

**ANALISIS PERKEMBANGAN CAPAIAN INDEKS
PEMBANGUNAN DESA (IPD) DI TIGA KABUPATEN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh:

Nama	: Voni yanti
NPM	: 2005180014
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	: Riset Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

NAMA : VONI YANTI
 N P M : 2005180014
 PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
 JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS PERKEMBANGAN CAPAIAN INDEKS
 PEMBANGUNAN DESA (IPD) DI TIGA KABUPATEN
 PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

DINYATAKAN : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Dr. SYLVIA VIANTY RANITA, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : VONI YANTI
N.P.M : 2005180014
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. PINANG BARIS NO. 62
Judul Tugas akhir : ANALISIS PERKEMBANGAN CAPAIAN INDEKS
PEMBANGUNAN DESA (IPD) DI TIGA KABUPATEN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Juli 2024

Pembimbing Tugas akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. DANURI, SE., M.M., M.Si., CMA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : VONI YANTI
N.P.M : 2005180014
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. PINANG BARIS NO. 62
Judul Tugas akhir : ANALISIS PERKEMBANGAN CAPAIAN INDEKS
PEMBANGUNAN DESA (IPD) DI TIGA KABUPATEN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Tugas akhir	Paraf	Keterangan
19/06/2024	Bab 4: Perbaiki gambaran umum dan jelaskan Indeks Pembangunan Desa		
27/06/2024	Bab 4: Tambahkan indikator ekonomi dan sosial di gambaran umum		
05/07/2024	Bab 4: Tambahkan data Indeks Pembangunan Desa per kabupaten		
10/07/2024	Bab 4: Perbaiki hasil regresi OLS Faktor yang mempengaruhi IPD		
19/07/2024	Bab 4: Perbaiki uji asumsi klasik		
24/07/2024	Bab 5: Membuat kesimpulan dan saran serta perbaiki penulisan skripsi		
29/07/2024	ACC Ujian Tugas Akhir		

Pembimbing Tugas akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Medan, Juli 2024
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Voni Yanti

NPM : 2005180014

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul **“Analisis Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) Di Tiga Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Voni Yanti

ABSTRAK

ANALISIS PERKEMBANGAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) DI TIGA KABUPATEN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Voni Yanti

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Email: yoniyanti22@gmail.com

Pada tahun 2001 Indonesia telah memasuki era baru dalam tata pemerintahan, yaitu pelaksanaan otonomi daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan dalam rangka pemerataan Pembangunan. Otonomi daerah memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan dan kepentingan wilayah mereka sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat, begitupun dalam bidang keuangan. Dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal di Indonesia maka Pemerintah Daerah harus mampu berperan dalam mengelola keuangannya secara mandiri sehingga seluruh potensi harus dioptimalkan melalui mekanisme perencanaan yang efektif dan efisien. Desentralisasi dan otonomi desa pada dasarnya bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan desa agar terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keperluan desa. Kondisi perkembangan pembangunan desa telah digambarkan dalam beragam indeks. Salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang bertujuan untuk melihat capaian pembangunan layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat desa. IPD mengklasifikasikan desa dalam 3 bagian yaitu desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan nilai IPD dan mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian nilai IPD di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi capaian nilai IPD. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel IPD baik secara parsial dan simultan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Desa, IPM, Desentralisasi Fiskal

ABSTRACT

Analysis Of The Development Of The Achievement Of The Village Development Index (IPD) In Three Districts Of North Sumatra Province In 2024

Voni Yanti

Development Economics Study Program

Email: Voniyanti22@gmail.com

In 2001 Indonesia has entered a new era in governance, namely the implementation of regional autonomy by considering the development capabilities of the regions concerned in the context of equitable development. Regional autonomy gives greater power to local governments to manage their own regional affairs and interests without too much interference from the central government, as well as in the financial field. With the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, Regional Governments must be able to play a role in managing their finances independently so that all potential must be optimized through an effective and efficient planning mechanism. Decentralization and village autonomy basically aim to make the community and villages independent so that the effectiveness and efficiency of development financing are formed in accordance with the conditions and needs of the village. The condition of village development development has been described in various indexes. One of them is the Village Development Index (IPD) which aims to see the achievements of basic service development to meet the Minimum Service Standards (SPM) at the village level. IPD classifies villages in 3 parts, namely disadvantaged, developing and independent villages. This study aims to analyze the development of IPD scores and estimate the factors that affect the achievement of IPD scores in Simalungun, Asahan and Tobasa Districts. The research method uses a quantitative method with a multiple linear regression analysis model to see the factors that affect the achievement of IPD scores. The type of data used in this study is secondary data. The results of this study show that the variables of Economic Growth (PE), Human Development Index (HDI), Government Expenditure (PP), Village Funds (DD) and Regional Original Income have a significant effect on the IPD variables both partially and simultaneously.

Keywords: Village Development Index, HDI, Fiscal Decentralization

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Analisis Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Tiga Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tuju kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi orang hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
3. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Prof Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr Hasrudy Tanjung, SE, M Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
10. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
11. Sahabat sekaligus teman-teman seperjuangan saya Agung Prabowo, Fani Rasya Kinanti, Tri Dias Palah dan Naufal Maulana Polem. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menemani perjalanan saya di masa-masa perkuliahan hingga sampai pada tahap pengerjaan skripsi ini, baik di masa suka maupun duka.
12. Dan yang terakhir ucapan terima kasih kepada diri saya sendiri, Voni Yanti. Terima kasih sudah mampu berjalan sejauh ini, terima kasih telah bertahan dari awal perkuliahan hingga sekarang. Pastinya banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi, terima kasih untuk tidak menyerah dan lebih memilih untuk menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin yang kamu bisa.

Pencapaian ini patut dirayakan mengingat waktu yang sudah kamu habiskan dalam pengerjaannya dan semoga masa depan yang cerah akan menghampirimu kelak.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	24
1.3 Batasan Masalah.....	25
1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	26
1.4.1 Rumusan Masalah.....	26
1.4.2 Tujuan Penelitian	26
1.5 Manfaat Penelitian.....	27
1.5.1 Manfaat Akademik.....	27
1.5.2 Manfaat Non-Akademik	27
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Uraian Teori.....	28
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	28
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	37
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah	51
2.2 Regulasi	56
2.2.1 Kebijakan Otonomi Daerah	56
2.2.2 Kebijakan Dana Desa.....	60
2.3 Penelitian Terdahulu	63
2.4 Kerangka Penelitian	67
2.4.1 Tahap Penelitian.....	67
2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian	67
2.4.3 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi Terkait Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa.....	68
2.5 Hipotesis	69
BAB III.....	70

METODE PENELITIAN	70
3.1 Pendekatan Penelitian.....	70
3.2 Definisi Operasional.....	70
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	71
3.4 Jenis dan Sumber Data	72
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.6 Teknik Analisis Data.....	72
BAB IV	84
HASIL PENELITIAN.....	84
4.1 Gambaran Umum	84
4.1.1 Geografis Sumatera Utara.....	84
4.1.2 Demografis Sumatera Utara.....	85
4.1.3 Perkembangan Indikator Sosial	88
4.1.3 Perkembangan Indikator Ekonomi	93
4.2 Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Desa Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Simalungun, Asahan, dan Tobasa	100
4.2.1 Perkembangan Nilai IPD provinsi Sumatera Utara	100
4.2.2 Perkembangan Nilai IPD Kabupaten Simalungun.....	108
4.2.3 Perkembangan Nilai IPD Kabupaten Asahan	110
4.2.4 Perkembangan Nilai IPD Kabupaten Toba Samosir.....	112
4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	114
4.4. Hasil dan Pembahasan.....	128
4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPD.....	128
4.4.2 Pengaruh IPM terhadap IPD.....	128
4.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPD.....	129
4.4.4 Pengaruh Dana Desa terhadap IPD	130
4.4.5 Pengaruh PAD terhadap IPD	130
BAB V	132
PENUTUP.....	132
5.1 Kesimpulan.....	132
5.2 Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 dan 2018	11
Tabel 1. 2 Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	16
Tabel 1. 3 Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2021	17
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	63
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Model Ekonometrika	71
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumatera Utara.....	86
Tabel 4. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Provinsi Sumatera Utara.....	87
Tabel 4. 3 Angka Kemiskinan	89
Tabel 4. 4 IPM Sumatera Utara dan Komponen	91
Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia.....	92
Tabel 4. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Provinsi Sumatera Utara	94
Tabel 4. 7 PDRB Perkapita Kabupaten Provinsi Sumater Utara	96
Tabel 4. 8 Gini Ratio Kabupaten Provinsi Sumatera Utara	97
Tabel 4. 9 Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi April 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	99
Tabel 4. 10 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Menurut Kabupaten/Kota, Dimensi IPD, Status IPD, dan Jumlah Desa di Sumatera Utara 2018.....	104
Tabel 4. 11 Hasil Regresi Ordinary Least Square (OLS)	114
Tabel 4. 12 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM).....	115
Tabel 4. 13 Hasil Regresi Fixed Effect Model	116
Tabel 4. 14 Hasil Uji Chow Pada Model FEM	117
Tabel 4. 15 Hasil Regresi Model Terbaik.....	118
Tabel 4. 16 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi	119
Tabel 4. 17 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi	120
Tabel 4. 18 Hasil Uji t	124
Tabel 4. 19 Hasil Uji F	125
Tabel 4. 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas	127
Tabel 4. 21 Hasil Uji Heteroskedastisitas	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023	3
Gambar 1. 2 Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Indonesia Tahun 2019-2023	5
Gambar 1. 3 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018	13
Gambar 1. 4 Perkembangan Indeks Pembangunan Desa.....	13
Gambar 1.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera ..	19
Gambar 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	20
Gambar 1.7 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2023	21
Gambar 1.8 IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018	23
Gambar 2. 1 Pengeluaran Pemerintah Pada Keynesian	52
Gambar 2. 2 Pertumbuhan Pengeluaran pemerintah Menurut Wagner.....	55
Gambar 2. 3 Kerangka Analisis Penelitian	67
Gambar 2. 4 Kerangka Konseptual Model Ekonometrik.....	68
Gambar 4. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara	88
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)	93
Gambar 4. 3 PDRB ADHB per kapita dan pertumbuhannya di Provinsi Sumatera Utara , 2023G pertumbuhannya di Provinsi Sumatera Utara , 2023.....	95
Gambar 4. 4 Persentase Desa Menurut Status Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan 201	106
Gambar 4. 5 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utar	107
Gambar 4. 6 Persentase Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Simalungun Tahun 2014 dan 2018	108
Gambar 4. 7 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Simalungun	109
Gambar 4. 8 Persentase Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Asahan Tahun 2014 dan 2018	110
Gambar 4. 9 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Asahan.....	111
Gambar 4. 10 Persentase Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014 dan 2018	112
Gambar 4. 11 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Toba Samosir.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

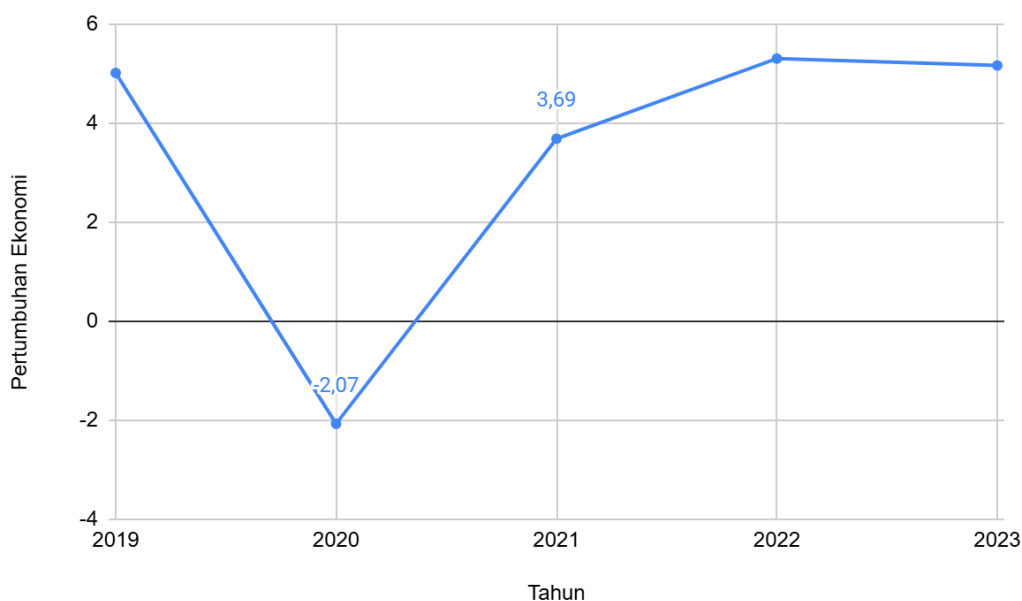
Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah perdesaan (rural area) maupun daerah perkotaan (urban area). Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, beberapa yang terpenting diantaranya masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan kemajuan antara kota -desa, masalah ketenaga-kerjaan, masalah lingkungan hidup. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan Nasional, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang sehingga akan saling mengisi, saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional meliputi pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2001 Indonesia telah memasuki era

baru dalam tata pemerintahan, yaitu pelaksanaan otonomi daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan dalam rangka pemerataan Pembangunan ke seluruh wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah dalam kedua UU tersebut dilaksanakan dengan harapan pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap aspirasi adanya keinginan baru mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia yang berimplikasi pada pelimpahan kewenangan dalam berbagai bidang. Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dibebankan melalui APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Salah satu akibat dari kebijakan otonomi daerah yaitu pemekaran wilayah. Secara umum terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, ketika merumuskan PP 129/2000 berkeinginan untuk mencari daerah otonom baru yang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Di sisi lain, ternyata pemerintah daerah memiliki pendapat yang berbeda. Pemerintah daerah melihat pemekaran wilayah sebagai Upaya untuk secara cepat keluar dari keterpurukan (David Jackson et.al., 2008). Menurut data yang dikeluarkan oleh Ditjen Otonomi Daerah, Kemeterian Dalam Negeri (2009), sebelum diberlakukannya otonomi daerah, yaitu tahun 1998, jumlah kabupaten dan kota di Indonesia hanya 298 kabupaten/kota. Namun semenjak diberlakukannya otonomi

daerah tahun 1999, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22/1999, jumlah kabupaten/kota di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tahun 2023 mengacu pada hasil pendataan rentang tahun 2018-2022, terdapat 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia.



Sumber: www.bps.go.id

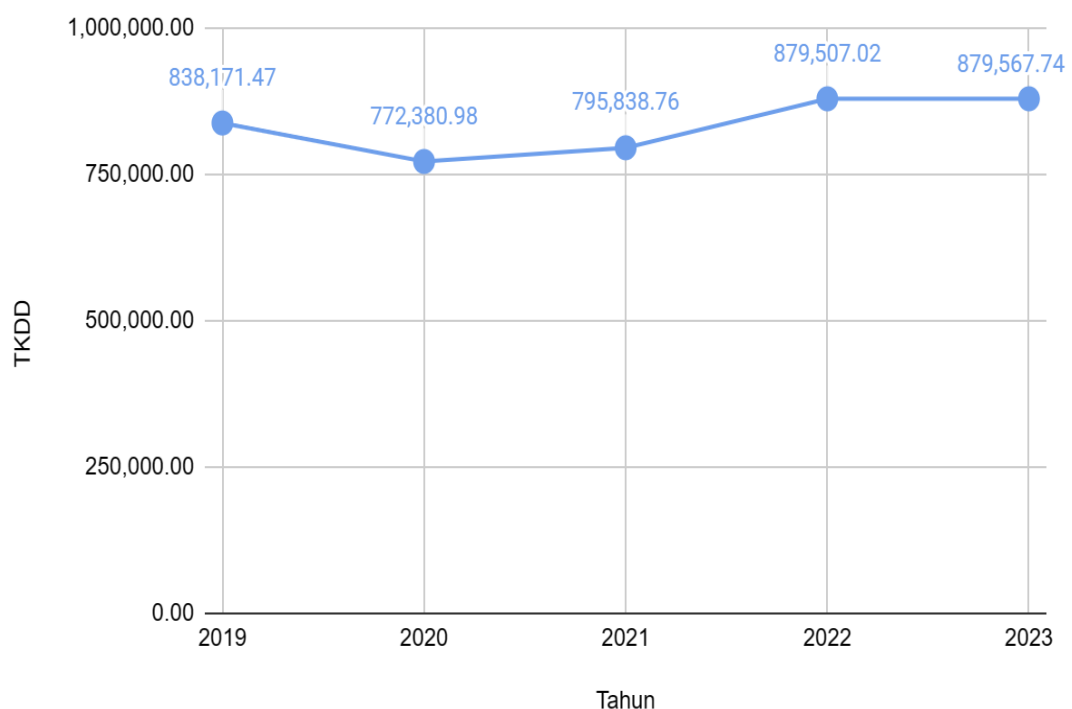
Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023

Pada tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5%, tetapi mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,07% akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, ekonomi Indonesia mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,69%. Tren pemulihan berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,31%, yang menandakan kembalinya ekonomi Indonesia ke tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sedikit menurun tetapi tetap stabil di sekitar 5,17%.

Otonomi daerah, yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayah mereka. Hal ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun regional, seperti yang terlihat dalam grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Secara keseluruhan, otonomi daerah berperan penting dalam memungkinkan pemerintah daerah untuk berkontribusi pada pemulihan dan stabilitas ekonomi pasca-krisis. Dengan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, daerah-daerah dapat lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan dan peluang yang ada, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan Pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana public sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program Pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat kedaerah (Kharisma, 2013). Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (bidang moneter dan fiscal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah) (Hadi & Saragih, 2013).

Dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal di Indonesia maka Pemerintah Daerah harus mampu berperan dalam mengelola keuangannya secara mandiri sehingga seluruh potensi harus dioptimalkan melalui mekanisme perencanaan yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam membangun daerahnya, termasuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 1. 2 Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) kementerian Keuangan RI, pada tahun 2019-2023 jumlah total Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 sebesar

Rp. 879.567,74 M naik sebesar Rp.60,72 M dari tahun 2020 sebesar Rp. 879.507,02 M. Namun pada tahun 2020 jumlah total TKDD menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak Rp. 65.790,49 M, tahun 2020 Total TKDD Rp. 772.380,98 M, menurun di tahun 2019 menjadi Rp.838.171,47. Nilai Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tersebut akan semakin meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.

Kebijakan desentralisasi fiskal banyak mengangkat mengenai persoalan di tingkat kabupaten/kota, namun masih sedikit yang mengangkat mengenai keterlibatan dan peran desa didalamnya. Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi di daerah. Desa merupakan ujung tombak dari keberhasilan kebijakan desentralisasi itu sendiri, sebab desa merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Melalui kebijakan desentralisasi desa pemerintahan tingkat desa dapat dipandang sebagai agen perubahan dan penyedia pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat.

Pada masa pemerintahan Jokowi Dodo tahun 2014 program desentralisasi fiskal yang sebelumnya sudah diterapkan di beberapa pemerintahan, ditingkatkan Kembali melalui nawacita Presiden Jokowi Dodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Desa didorong untuk selalu melakukan inovasi dan terus melakukan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Besarnya dana transfer ke desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar pedesaan dan perkotaan. Namun permasalahan yang masih kita lihat yaitu kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, tingkat stress tinggi,

penyalahgunaan lahan, pencemaran lingkungan, tingkat kesadaran masyarakat rendah, pelanggaran hukum, dan masih banyak anak putus sekolah. Desentralisasi dan otonomi desa pada dasarnya bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan desa agar terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan (Kolopaking, 2011;137). Pada hakekatnya, pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Namun demikian, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerja keras para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pembangunan desa di negara berkembang dilaksanakan dengan beragam cara, salah satunya adalah dengan menyediakan modal bergulir di tingkat lokal. Contohnya adalah Thailand, setelah meluncurkan program Dana Desa dan Perkotaan pada tahun 2001 masyarakat Thailand mampu menyediakan modal kerja bagi asosiasi kredit bergilir yang dikelola secara lokal. Namun ternyata, pinjaman dari Bank untuk Pertanian dan Koperasi Pertanian memiliki dampak yang lebih kuat. Modal kerja mengalir secara tidak proporsional ke rumah tangga berpenghasilan rendah. (Boonperm, et al. 2013). Sementara itu, di Nepal kredit mikro adalah alat yang efektif untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin, terutama perempuan (Adhikari dan Shrestha, 2013). Selain kredit mikro, ada negara lain yang merancang desa dengan rencana induk.

Di Indonesia sendiri, percepatan pembangunan desa berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan embung, jalan desa, jembatan, pasar desa, penahan tanah, tambatan perahu, air bersih, drainase, saluran irigasi, hingga tempat mandi cuci kakus (MCK) dan sumur. Pembangunan juga mencakup aktivitas ekonomi sosial seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pembangunan tempat olah raga desa, pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Posyandu (Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu), serta infrastruktur lainnya. Hal tersebut konsisten dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Laporan Kinerja PPMD 2018).

Untuk mendukung peningkatan pembangunan fisik di daerah, Pemerintahan Jokowi meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi dana desa secara bertahap ini, sekaligus untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa. Dana desa yang bergulir dari tahun 2015 hingga 2019 pun sudah melebihi Rp252 triliun. Salah satu pencapaiannya dapat dilihat pada tahun 2018 desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa, dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa. Percepatan ini dimulai sejak tahun 2014, setelah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ditetapkan. Paradigma pembangunan desa mengikuti pola desentralisasi. Kondisi ini memberikan paradigma baru bagi perangkat desa dalam memahami sistem finansial, pemberdayaan warga, sehingga penguatan institusi di tingkat desa diperlukan untuk mendorong pemerintah desa bekerja dengan baik (Antlöv, et al. 2016). Sehingga, peningkatan anggaran dana desa dapat menjadi harapan baru karena menjadi stimulus yang baik bagi pertumbuhan perekonomian desa.

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan desa cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat 91% wilayah Indonesia merupakan wilayah perdesaan (Data Kementerian Dalam Negeri (2019) dalam Iskandar (2020)). Selain itu, masih banyak penduduk Indonesia berdomisili di wilayah perdesaan dengan berbagai permasalahan yang ada seperti tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2021a), serta kurang optimalnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sehingga memerlukan peningkatan (Marsono, 2017). Salah satu penyebab lebih banyaknya penduduk perdesaan di banding perkotaan adalah rata-rata usia perkawinan pertama wanita di daerah perdesaan masih lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan yaitu 21,8 tahun di perdesaan dan 24,1 tahun di perkotaan sehingga potensi peluang jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita di perdesaan akan lebih besar dibandingkan jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2016). Meski demikian, karena berbagai alasan seperti faktor sosial ekonomi, termasuk kemiskinan, kerawanan pangan, kurangnya kesempatan kerja, akses terbatas ke perlindungan sosial, penipisan sumber daya alam dan dampak buruk dari degradasi lingkungan dan perubahan iklim membuat banyak penduduk desa bermigrasi ke wilayah perkotaan ((FAO, 2016; Herlindawati et al., 2018).

Kondisi perkembangan pembangunan desa telah digambarkan dalam beragam indeks. Setidaknya ada tiga indeks yang dihitung dan memiliki tujuan yang berbeda. Pertama, Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang berfungsi sebagai penentu pembagian dana desa. Semakin bagus pembangunan desa, maka nilai kesulitannya semakin berkurang. Indeks yang kedua yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang bertujuan untuk melihat capaian pembangunan layanan dasar guna

memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat desa. Semakin baik pembangunan desa, semakin mandiri desa tersebut untuk meningkatkan daya saing desa. Ketiga, Indeks Desa Membangun (IDM) yang berfungsi menilai keberlangsungan pembangunan desa. Pembangunan desa yang baik, menggambarkan kualitas pembangunan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang baik juga.

Indeks pembangunan desa (IPD) merupakan gambaran tingkat kemajuan desa dalam suatu waktu pada wilayah tertentu dengan pengklasifikasian yang terbagi dalam 3 bagian yaitu desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Desa tertinggal merupakan suatu wilayah dimana masyarakat dan potensi yang dimilikinya relatif belum berkembang apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Beberapa faktor yang menyebabkan desa tertinggal adalah keberadaan infrastruktur prasana wilayah seperti keberadaan sumber air bersih, sumber listrik, dan fasilitas sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi . Desa berkembang merupakan desa yang sudah terpenuhi standar pelayanan minimum (SPM) namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan dan keberadaan infrastrukturnya sudah ada namun masih perlu untuk diperbaiki dan dibangun. Dan Desa mandiri adalah desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan.

IPD telah digunakan untuk merancang desa target RPJMN tahun 2015-2019. Adapun yang menjadi target capaian adalah berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa dan meningkatnya desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Pengukuran pembangunan desa menggunakan Indeks Pembangunan Desa

dilakukan sebanyak 4 tahun sekali, hingga saat ini pengukuran pembangunan desa menggunakan Indeks Pembangunan Desa telah dilakukan dua kali yaitu tahun 2014 dan 2018. Hasil pengukuran juga dituangkan dalam bentuk buku yang di publikasikan pada web Badan Pusat Statistik. Namun hingga saat ini hasil pengukuran IPD tahun 2022 yang seharusnya sudah di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik tidak terlaksanakan. Dalam hal ini seharusnya pengukuran Indeks Pembangunan Desa terus dilaksanakan.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 dan 2018

Kategori Desa	2014	2018
Desa Mandiri	2.898	5.606
Desa Tertinggal	20.432	14.461
Desa Berkembang	50.763	55.369

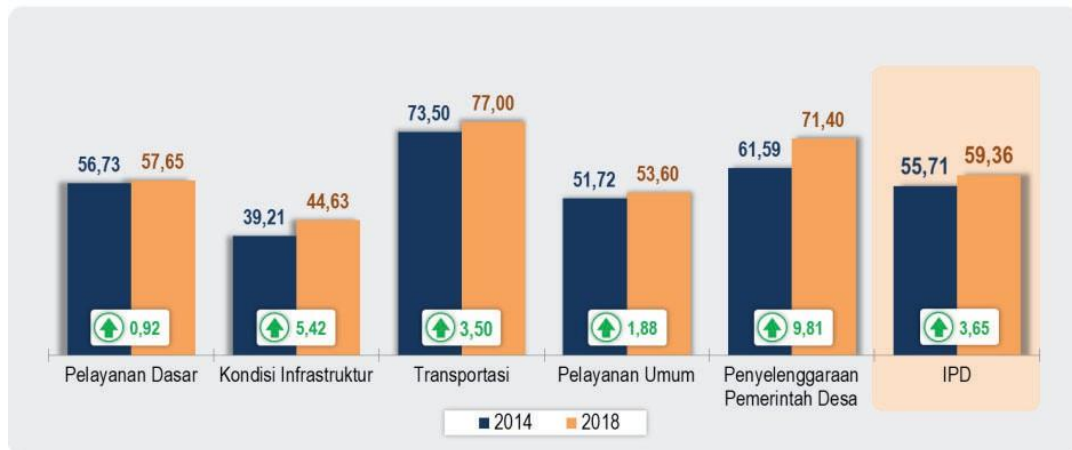
Sumber: www.bps.co.id

Sesuai dengan capaian RPJMN tahun 2015-2019, yaitu diharapkan 5 tahun kedepan jumlah desa tertinggal berkurang sebanyak 5000 dan jumlah desa mandiri meningkat sebanyak 2000. Dari data perkembangan pembangunan desa menurut status Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 dan 2018, capaian tersebut berhasil dilakukan oleh pemerintahan desa. Jumlah desa tertinggal pada tahun 2014 sebanyak 20.432, namun di tahun 2018 menurun sebanyak 5.971 yaitu menjadi 14.461 desa. Untuk desa mandiri pada tahun 2014 sebanyak 2.898, di tahun 2018 meningkat menjadi 5.606, dalam hal ini jumlah desa mandiri meningkat sebanyak 2.708 desa. Penurunan jumlah desa tertinggal tentunya disebabkan oleh efektivitas kebijakan pemberian dana desa yang dapat membantu desa dalam Pembangunan daerah. Jumlah desa berkembang juga mengalami peningkatan. pada

tahun 2014 jumlah desa berkembang sebanyak 50.763, namun tahun 2018 sebanyak 55.369. Dimensi dan variabel IPD didasarkan atas sintesa terhadap:

1. Data Potensi Desa 2018
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pasal 74 tentang Kebutuhan Pembangunan Desa dan pasal 78 tentang Tujuan Pembangunan Desa.

Dalam pasal 74 disebutkan bahwa paling tidak ada 4 aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: (1) Kebutuhan Dasar; (2) Pelayanan Dasar; (3) Lingkungan; dan (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam bagian penjelasan dalam UU tersebut, kebutuhan dasar didefinisikan sebagai upaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sementara, pelayanan dasar antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan dalam pasal 78 tujuan pembangunan desa meliputi: (1) Kesejahteraan Masyarakat; (2) Kualitas Hidup; dan (3) Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui (1) Kebutuhan Dasar; (2) Sarana; (3) Prasarana; (4) Pengembangan Ekonomi Lokal; dan (5) Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan.



Sumber: BPS Indeks Pembangunan Desa (www.bps.co.id)

Gambar 1. 3 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018

Dapat dilihat dari gambar diatas perkembangan pembangunan desa ini dilihat dari lima dimensi standard minimal pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah desa. Masing-masing memiliki capaian yang berbeda. Capaian tertinggi terjadi pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan, yang meningkat sebesar 9,81 poin. Sementara capaian peningkatan terendah pada dimensi pelayanan dasar sebesar 0,92 poin.



Sumber: BPS Indeks Pembangunan Desa (www.bps.co.id)

Gambar 1. 4 Perkembangan Indeks Pembangunan Desa

Secara nasional, tahap perkembangan desa di indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil

rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

IPD paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali (67,82). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (35,57). Dilihat dari tingkat perkembangannya, 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya termasuk dalam kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar pulau yang rata-rata indeksnya masuk dalam kategori desa berkembang. Pulau-pulau tersebut antara lain: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Pulau Papua rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal.

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dalam kepemimpinan pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi – Jusuf Kalla.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa

serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

1. Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman)
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah).
3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggapan Bencana)

Klasifikasi desa menurut pengukuran Indeks Desa Membangun terdiri dari lima status yaitu Desa Mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal. Desa Tertinggal adalah Desa yang IDM-nya kurang dari sama dengan 0,598 dan lebih besardari 0,490

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Tabel 1. 2 Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Status Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Mandiri	840	1.741	3.278	6.238	11.456
Maju	8.647	11.899	15.324	20.248	23.029
Berkembang	38.185	39.866	38.086	33.892	28.751
Tertinggal	17.626	13.961	12.177	9.234	6.803
Sangat Tertinggal	3.536	2.466	4.985	4.438	4.382

Sumber: www.idm.kemendesa.go.id

Dari gambar diatas dapat kita lihat jumlah desa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 jumlah desa menurut status desa mandiri tercatat sebanyak 840 desa, diikuti pada tahun 2020 sebanyak 1.741 desa, pada tahun 2021 jumlah desa yang berstatus mandiri berjumlah sebanyak 3.278 desa, pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 6.238 dan 11.456 desa. Untuk status desa tertinggal mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai ke tahun 2023. Lain halnya dengan jumlah desa yang berstatus desa sangat tertinggal, pada tahun 2019 jumlah desa yang berstatus sangat tertinggal berjumlah sebanyak 3.536, menurun di tahun 2020 yaitu menjadi sebanyak 2.466, namun pada tahun 2021 jumlah desa sangat tertinggal mengalami peningkatan yaitu sebesar 4.985, sedangkan di tahun 2022 dan 2023 jumlah desa sangat tertinggal menurun Kembali menjadi 4.438 dan 4.382.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mempengaruhi perkembangan seluruh wilayah di Indonesia salah satunya provinsi Sumatera utara. Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian barat Indonesia, terdapat 25 Kabupaten, 8 Kota, 455 kecamatan dan 504 Kelurahan, 5.609 desa pada tahun 2022. Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Tahun 2022 berjumlah 15.115.206 jiwa. Sementara itu hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencapai 14.799.361 jiwa.

Perkembangan status desa juga didukung oleh kebijakan pemberian dana desa. Menurut Data yang dikutip oleh Dirjen Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara pertama sekali menerima Dana Desa sebesar Rp 1,46 triliun pada tahun 2015. Jumlah Dana Desa tersebut terus meningkat secara fantastis hingga mencapai Rp. 4,45 triliun pada tahun 2019. Secara rinci dalam paparan Kemenkeu Tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 4,5 triliun untuk 5.417 Desa. Dan mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.7.915.875.054.000 (dalam ribuan).

Tabel 1. 3 Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2021

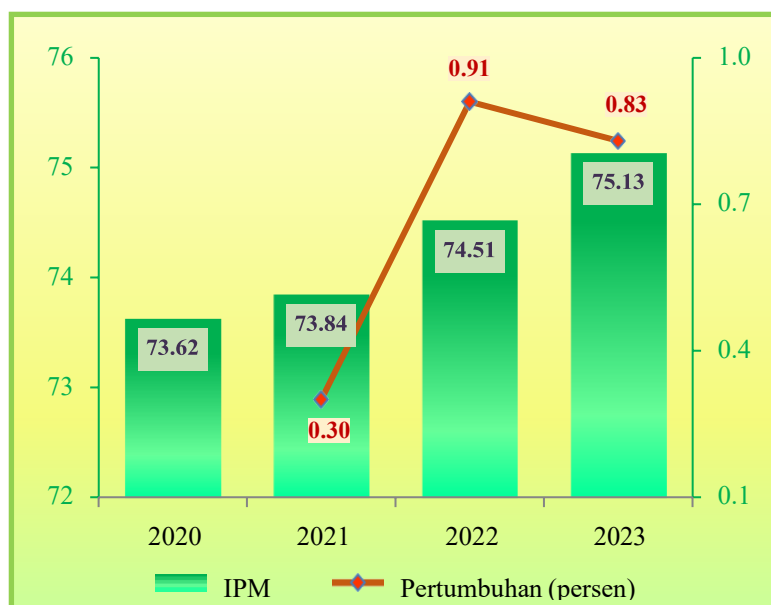
Nama Daerah	Jumlah Desa	Dana Desa(dalam ribuan rupiah)		
		2019	2020	2021
Kab. Asahan	177	146.090.415	150.506.325	152.083.710
Kab. Dairi	161	127.172.564	130.304.470	129.738.730
Kab. Deli Serdang	380	306.386.948	312.277.329	312.546.966
Kab. Karo	259	197.078.926	201.208.286	198.409.273
Kab. Labuhan Batu	75	70.226.102	72.182.696	74.477.417

Kab. Langkat	240	205.446.268	211.213.265	213.259.749
Kab. Mandailing Natal	377	285.841.420	290.920.103	286.845.864
Kab. Nias	170	180.585.127	181.381.215	179.544.025
Kab. Simalungun	386	294.442.204	298.689.733	296.800.840
Kab. Tapanuli Selatan	211	167.751.279	172.034.790	169.754.513
Kab. Tapanuli Tengah	159	140.541.973	144.349.335	142.631.022
Kab. Tapanuli Utara	241	184.186.164	194.621.304	192.016.817
Kab. Toba Samosir	231	176.101.238	179.571.269	177.074.852
Kab. Pakpak Bharat	52	48.298.630	50.424.120	50.970.983
Kab. Nias Selatan	459	348.422.333	356.099.164	351.138.751
Kab. Humbang	153	123.336.297	126.028.454	124.934.505
Hasundutan Kab. Serdang Bedagai	237	184.774.302	187.834.594	185.739.448
Kab. Samosir	128	108.744.499	109.313.044	107.929.748
Kab. Batu Bara	141	118.843.171	121.634.028	121.071.737
Kab. Padang Lawas	303	230.097.858	233.549.721	230.275.200
Kab. Padang Lawas Utara	386	287.244.660	293.516.929	289.345.427
Kab. Labuhan Batu	52	61.548.371	65.076.224	67.788.110
Selatan				
Kab. Labuhan Batu Utara	82	79.123.527	83.576.158	86.022.841
Kab. Nias Utara	112	137.008.319	137.596.573	136.386.189
Kab. Nias Barat	105	114.000.248	118.531.988	117.397.253

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan 2020 (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menerima anggaran dana Desa tahun 2021 terbesar berturut-turut adalah Kabupaten Nias Selatan (Rp.304.227.954), Kabupaten Deli Serdang (Rp.251.866.280), Kabupaten Simalungun (Rp.255.843.116), Kabupaten Padang Lawas Utara (Rp. 255.843.116), dan Kabupaten Mandailing Natal (Rp. 249.877.862). Sedangkan kabupaten yang menerima anggaran dana desa paling rendah yaitu Kabupaten Pakpak Barat yaitu sebesar (Rp.50.970.983), anggaran dana desa terendah kedua diberikan kepada Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Rp.67.788.110).

Salah satu indikator pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. (Rapanna & Fajriah, 2018). berikut ini merupakan IPM kabupaten di Sumatera Utara.

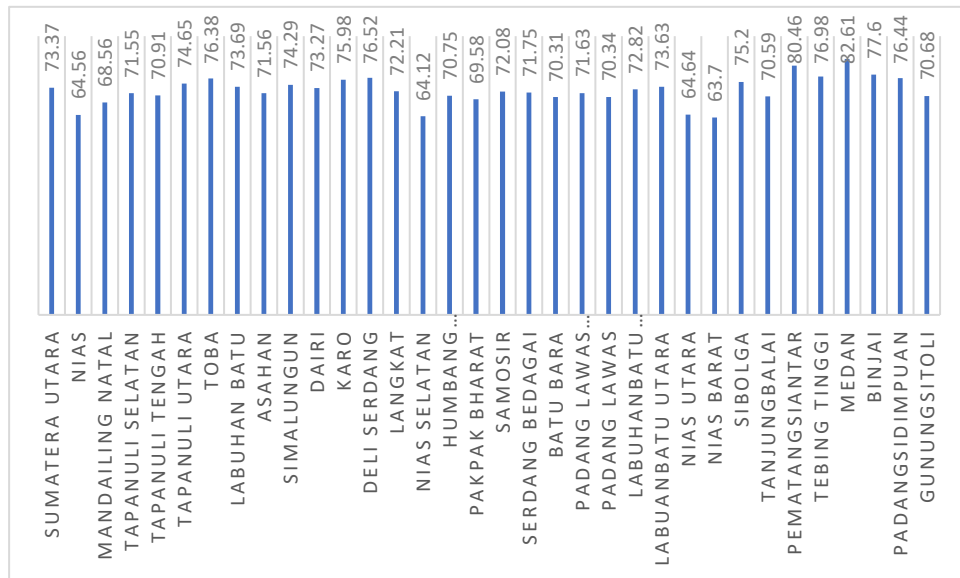


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id)

Gambar 1.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera

Selama periode 2020-2023, IPM di Sumatera Utara setiap tahunnya rata-rata tumbuh sebesar 0,68 persen per tahun. Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan pada tahun 2021 hanya sebesar 0,30 persen. Perlambatan di masa pandemik Covid ini disebabkan oleh penurunan dimensi

standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023 IPM di Sumatera Utara Kembali meningkat sebesar 0,83 meskipun terbilang menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,91. Nilai IPM Sumatera Utara tahun 2020-2023 pada umumnya mengalami peningkatan.

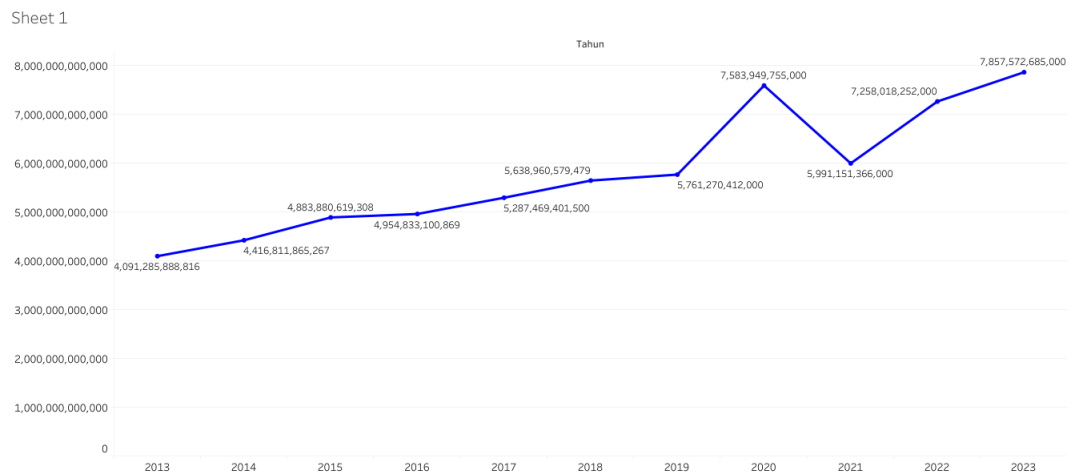


Sumber: www.sumut.bps.go.id

Gambar 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada level kabupaten/kota di Sumatera Utara dicapai oleh Kota Medan dengan capaian IPM sebesar 82,61. Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Hal ini mendukung Kota Medan dalam pencapaian pembangunan manusia. Akses untuk mendapatkan pendidikan maupun kesehatan pun sangat mudah, menjadikan Kota Medan sebagai kantung sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi, serta rujukan kesehatan.

Pembangunan suatu desa salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan di desa. Dengan PAD yang tinggi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya, peningkatan PAD dapat digunakan untuk memperbaiki jalan desa, membangun fasilitas kesehatan, menyediakan air bersih, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Semua ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan IPD, yang mencerminkan kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, dan tingkat pembangunan di desa.

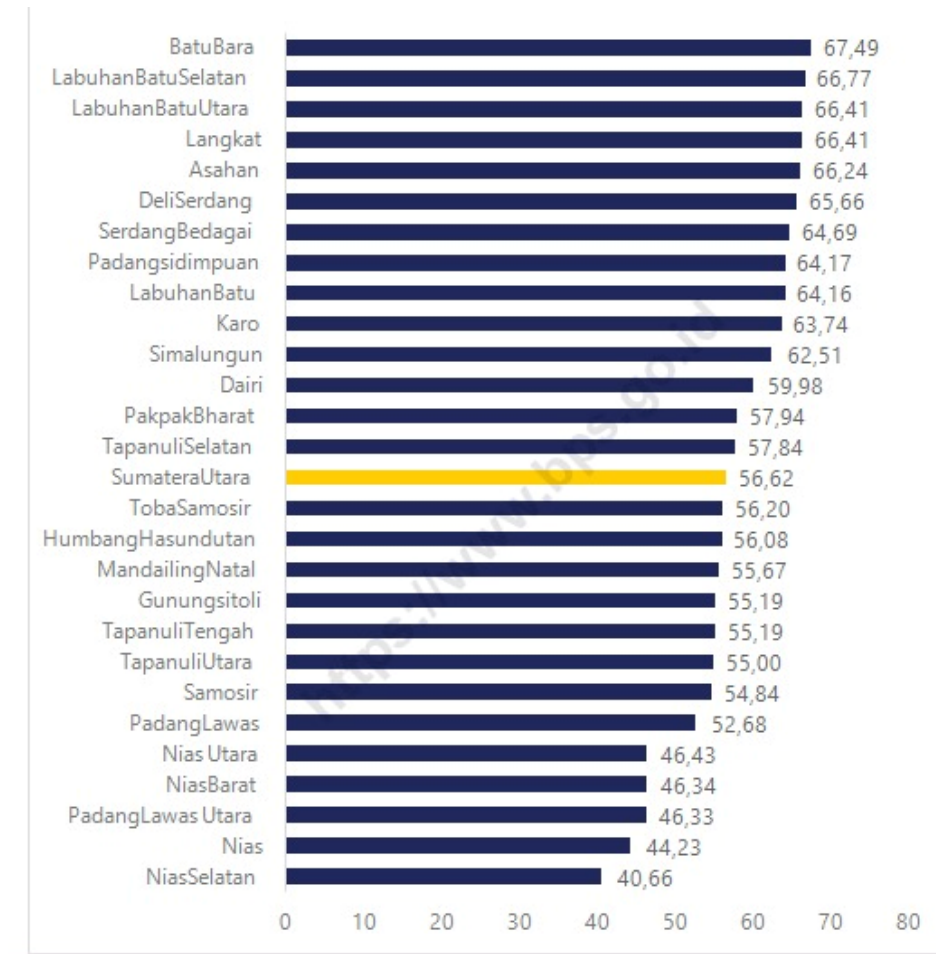


Sumber: BPS Sumatera Utara (www.sumut.bps.co.id)

Gambar 1.7 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2023

Dari gambar diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara mengalami trend peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2013 sampai tahun 2020, namun mengalami penurunan di tahun 2021 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Ditahun 2022 dan 2023 PAD kembali meningkat dengan nilai sekitar 7.857 triliun.

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utara sebesar 56,62. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 59,36. Dari 5.437 desa, terdapat 3.768 desa dalam kategori berkembang (69,30 persen), sebanyak 200 desa mandiri (3,68 persen), dan sisanya sebanyak 1.469 desa (27,02 persen) dalam kategori desa tertinggal. Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada Dimensi Kondisi Infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 41,71. Untuk Dimensi Pelayanan Dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, Dimensi Pelayanan Umum sebesar 49,76, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 62,43.



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018 (www.bps.co.id)

Gambar 1.8 IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49. Di kabupaten ini, dari 141 desa yang ada, tidak ada yang berstatus desa tertinggal, namun desa mandiri baru 12 desa, 129 desa lainnya masih berstatus berkembang. Sedangkan untuk rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 40,66. Di kabupaten ini jumlah desa tertinggal terbanyak diantara kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 369 desa dan tidak ada desa mandiri di kabupaten ini. Secara jumlah, desa mandiri tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah desa sebanyak 80 unit.

Kabupaten Simalungun dan Kabupaten asahan memiliki nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yaitu 62,51 dan 66,24 diatas nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Sumatera Utara yaitu sebesar 56,62. Sedangkan untuk rata-rata IPD Kabupaten Toba berada dibawah nilai rata-rata Sumatera Utara yaitu sebesar 56,20. Ketiga kabupaten tersebut memiliki potensi daerah masing-masing mulai dari potensi ekonomi maupun potensi pariwisata.

Kabupaten Asahan penghasilan utama penduduk berasal dari sektor pertanian yang juga menjadi potensi utama desa yaitu kelapa sawit. Hal ini ditandai dengan banyaknya desa (122 desa) yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Asahan. Pada tahun 2018 ini, sebagian besar desa di Asahan termasuk dalam kategori Desa Berkembang dan baru sebagian kecil desa yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri.

Potensi yang dimiliki setiap daerah dapat dikembangkan melalui pemberian alokasi dana desa ,yang dapat menjadi salah satu peluang besar untuk melaksanakan Pembangunan di daerahnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) di 3 Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah mengenai analisis perkembangan Indeks Pembangunan Desa di 3 kabupaten Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia terus meningkat setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tahun 1999, namun pertumbuhan ekonominya belum merata.
2. Pemberian dana desa dimulai dari 2014 namun belum terealisasi secara maksimal.
3. Desa masih menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya secara efektif, termasuk dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meskipun ada peningkatan pada beberapa aspek, masih banyak desa yang berada dalam kategori tertinggal atau sangat tertinggal.
5. Perbedaan nilai IPD antar pulau menunjukkan bahwa pembangunan desa belum merata di seluruh Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti menetapkan batasan masalah yaitu penelitian ini dilakukan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba dengan mengambil data makro ekonomi berupa Indeks Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Desa (IPD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Desa, Pendapatan Asli daerah (PAD), dan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2014, 2018 dan 2022 sebagai sampel yang digunakan.

1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capaian nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis ekonomi deskriptif tentang perkembangan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa tahun 2014 dan 2018.
2. Melakukan estimasi tentang pengaruh variable Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa Provinsi Sumatera Utara tahun 2014, 2018 dan 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dijadikan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Manfaat akademik sebagai bahan kajian dan literatur bagi akademisi seperti dosen serta mahasiswa dalam menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di 3 Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

1.5.2 Manfaat Non-Akademik

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini di jadikan masukan yang bermamfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan Analisis pembangunan wilayah desa di kawasan Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa.
2. Bagi stakeholder, hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan IPD di kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro, 2015).

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, Pengantar Makro Ekonomi, 1994).

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*).

2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini :

a. Hukum alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganuy paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasae bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan : pertama, meningkatnya keterampilan pekerja. Kedua, penghematan waktu dalam memproduksi barang. Ketiga, penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar – menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan. “Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*dicountinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan,2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan,2010).

Maka pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengansumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan

mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna,. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut "aru" sirkuler) yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dalam lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan. (Jhingan,2010).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama terusmenerus diruntuhkan dan struktur bar uterus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputusputus. Gerakan siklis merupakan baiaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalanannya yang dinamis. Penerapan teori Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi, mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflsioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jingan,2010).

3. Teori David Ricardo

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingan dan Todaro).

Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1917). melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “ pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi (Jhingan, 2010) . Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

- a) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri.
- b) Berlakunya hukum : “ law of deminishing return “ bagi tanah
- c) Persediaan tanah adalah tetap
- d) Permintaan gandum benar – benar inelastik
- e) Buruh dan Modal adalah masukan yang bersifat variabel
- f) Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
- g) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara

minimal

- h) Harga penawaran buruh adalah tertentu
- i) Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
- j) Terdapat persaingan sempurna
- k) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Teori David Richardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bilamana faktor – faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

B. Teori Arthur Lewis (1954)

Teori ini merupakan teori pengembangan dari teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Adam Smith, dimana perpacuan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk dan dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai keadaan yang stasioner. Dalam hal ini Ricardo menyatakan bahwa jumlah penduduk ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku. Jika tingkat upah diatas upah yang disebutnya pas-pasan untuk hidup maka orang merasa hidup sejahtera dan akan menambah jumlah anak, sementara jika tingkat upah dibawah tingkat upah yang pas-pasan maka jumlah penduduk akan turun. Dalam jangka panjang tingkat upah akan cenderung sama dengan tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup sehingga tidak ada dorongan untuk bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Oleh karena itu Ricardo

mengasumsikan dalam jangka panjang jumlah penduduk akan konstan, karena output tergantung pada jumlah penduduk maka diperkirakan dalam jangka panjang output nasional akan cenderung tumbuh konstan, sehingga pendapatan perkapita akan konstan.

C. Teori Harrod Domar (1957)

Inti dari teori ini adalah pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tingkat tabungan. Jika tingkat tabungan rendah maka pertumbuhan ekonomi akan rendah juga, dan sebaliknya. Teori makro dalam ekonomi klasik menekankan bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi terletak pada sisi supply. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh JB Say bahwa *supply creates its own demand*, bahwa *supply* menciptakan permintaan dengan sendirinya. Sedangkan disisi lain Keynes menyatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi terletak pada sisi pengeluaran. Pendapatan nasional akan mengalami peningkatan jika terdapat perubahan dalam pengeluaran rumah tangga (konsumsi), perusahaan (investasi) atau pemerintah (*government expenditure*). Harrod Domar pada dasarnya mengingatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi hanya akan terjamin apabila terjadi keseimbangan antara sisi produksi (Klasik) dengan sisi pengeluaran (Keynes).

4. Indeks Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia adalah modal yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang

dan berkelanjutan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, aspek yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan, dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga hal tersebut satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian dalam konteks pembangunan SDM, ketiga aspek tersebut harus diperhatikan secara utuh.

Indeks pembangunan manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

- a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

- b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah,
- c. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli dalam dollar AS

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hollis B. Chenery (Todaro & Smith, 2011), Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah kondisi yang penting dan utama bagi kelangsungan Pembangunan ekonomi dan akhirnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Setiap tahunnya jumlah penduduk terus bertambah yang dibarengi kebutuhan konsumsi sehari-hari maka dibutuhkan peningkatan pendapatan setiap tahunnya. (Rahayu, 2020)

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

a. Pertumbuhan output

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Sumber daya alam
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi

apabila *output* terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan *output*, unsur ini dianggap mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang.

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan output juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

b. Pertumbuhan penduduk

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan

meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan. (Mudrajad Kuncoro, 2000).

Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri- ciri sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi.
- b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (*natural wage*).

- c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.
 - d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
 - e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.
3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau pertumbuhan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan. Malthus membeberkan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertumbuhan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam

teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*theory of underconsumption*). (Boediono, 2009).

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi institusi yang bersifat sosiologis- ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat tinggi, keadaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia. (Boediono, 2009).

Pandangan yang dangkal tetapi populer itu kebenarannya dibantah oleh Malthus. Malthus menunjuk kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara yang dimaksud bukanlah disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas tanah karena penduduk bertambah; bukan pula oleh “kemalasan” penduduk. Kemiskinan itu ada sangkut-pautnya dengan kenyataan bahwa tanah yang sangat luas dikuasai oleh segelintir kalangan atas dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga tuan tanah. Konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serupa itu tidak memberikan dorongan dan sama sekali tidak mengandung perangsang bagi petani penggarap tanah untuk mencari kemajuan dengan cara meningkatkan hasil produksinya, apalagi dengan cara melakukan investasi. Hal ini dikarenakan

sebagian besar hasil produksi tanah dinikmati oleh tuan tanah, sedangkan hasil produksi masyarakat kecil (golongan lemah) lebih diperuntukkan buat pemenuhan kebutuhan dasar dan hanya sebagian kecil yang diinvestasikan. (Boediono, 2009).

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung di dalam gagasan-gagasan para pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam sistem pemikiran Karl Marx, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang – kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang terkenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. (Boediono, 2009).

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki

posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh. Pada masa itu modal merupakan kunci untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan kapitalis untuk mengakumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. (Boediono, 2009).

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Perapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut

teijembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun.

Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (kumulatif). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. (Jhingan, 2010).

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut *multiplier* K. Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah $\Delta Y = K \Delta I$, dan $1-1/K$ mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali $K = 1/1-MPC$. Karena kecenderungan marginal

berkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan. (Jhingan, 2010).

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam “*General Theory*”-nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul “*Economic Possibilities for Our Grand Children*” Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk; (ii) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan; dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat optimis. Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan *overproduksi* umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010).

C. Teori pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

1. W. W. Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* pada Maret 1956 berjudul *The Take- Off Into Self-Sustained Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. (Boediono, 2009).

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi '*less developed*', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi '*more developed*' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern.

Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap- tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel – variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat unilinear dan universal, serta dianggap bersifat permanen.

Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para

pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai "teori modernisasi". (Kuncoro M., 2000).

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu :

1. Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*)
 2. Masyarakat Pra-kondisi untuk Periode Lepas Landas (*The Preconditions for Take Off*)
 3. Proses Lepas landas (*The Take Off*)
 4. Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)
 5. Tingkat Konsumsi Tinggi (*High Mass Consumption*)
2. Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod- Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). (Boediono, 2009).

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- a. Perkonomian bersifat tertutup

- b. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan
- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale).
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (Capital Output Ratio/COR) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$).

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

D. Produk Domestik Bruto

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP).

Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam *Gross Domestic Product* (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Selain itu, *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2006).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (*Case & Fair*, 2008):

a) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

b) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

c) Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi

yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

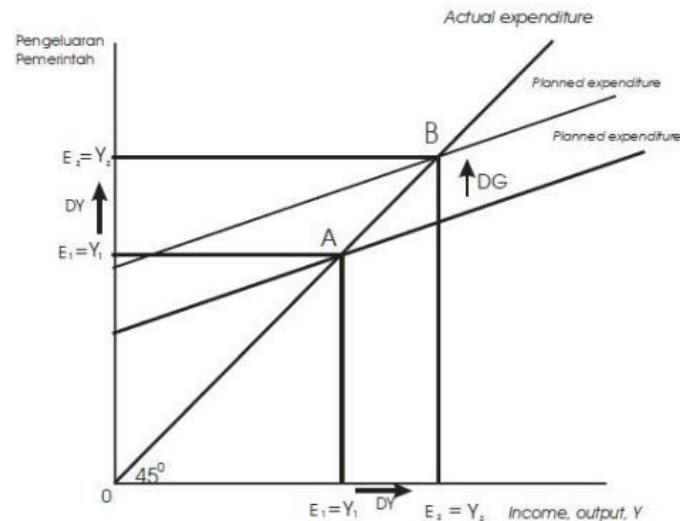
Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran 35 pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/ hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP).

A. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263)



Sumber : Mankiw, 2003; 263

Gambar 2. 1 Pengeluaran Pemerintah Pada Keynesian

Pada gambar 2.1 dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat

output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesoebroto, 1993; 169):

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesoebroto menjelaskan dalam bukunya bahwa model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk

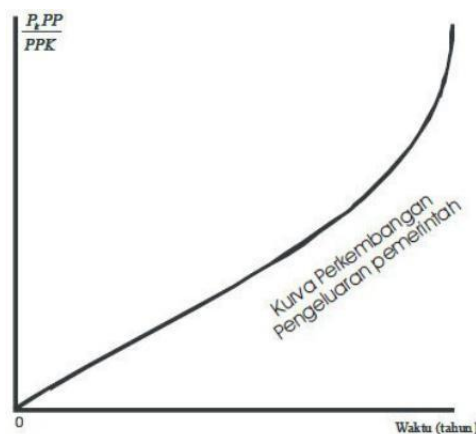
aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

2. Hukum Wagner

Hukum Wagner yang dijelaskan oleh Mangkoesoebroto mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke 19, hukum tersebut berbunyi : dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner ini memiliki kelemahan karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangan dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 2.2 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).



Sumber : Mangkoesoebroto, 1993; 172

Gambar 2. 2 Pertumbuhan Pengeluaran pemerintahan Menurut Wagner

3. Teori Peacock dan Wiseman

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesoebroto : 173). Menurut Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pendapat Peacock dan Wiesman yang mengemukakan adanya peran pemungutan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh teori Erick Lindahl. Lindahl berpendapat bahwa penyediaan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pemungutan pajak kepada semua masyarakat yang berstatus wajib pajak dengan porsi yang sama. Namun, untuk mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat dengan tarif pajak yang diberlakukan untuk ketersediaan infrastruktur maka pemerintah memberlakukan tarif pajak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Meskipun, dengan tarif pajak yang diberlakukan kepada

masyarakat berbedabeda tapi pemerintah berharap penerimaan dari pajak tetap sama dengan pemberlakuan tarif pajak yang sama kepada masyarakatnya.

2.2 Regulasi

2.2.1 Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan alternatif pemecahan masalah kesenjangan pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemerintah daerah yang selama ini dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menurut UU No.22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi daerah otonom, artinya penetapan kebijakan sendiri, serta pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban daerah sendiri (Aser,2005).

Sistem pemerintahan republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuk daerah otonomi daerah yang terbagu dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: “ Daerah Otonom”, selanjutnya disebut

daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada masa sebelum otonomi daerah, semua wewenang pemerintah dipegang oleh pemerintah pusat, daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah membuat wewenang pemerintah daerah semakin besar. Kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional.

Prinsip pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa sekarang ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada daerah tingkat II dan bukan kepada daerah tingkat I atau desa, karena pemerintah daerah tingkat II dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Menurut Arsyad (2005) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Otonomi daerah memiliki tiga asas pada prinsip pelaksanaan. Yaitu :

- A. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
- B. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
- C. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Desentralisasi dari aspek fiskal merupakan otonomi keuangan yang meliputi pemberian wewenang penerimaan (revenue assignment) dan pengeluaran (expenditure assignment) yang memungkinkan daerah dapat memobilisasi sumber-sumber penerimaan dan meningkatkan kapasitas keuangan. Dengan desentralisasi, sebagian atau seluruh fungsi pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah. Pemerintah daerah membiayai pelaksanaan fungsi tersebut dengan PAD yang dihasilkan oleh setiap daerah. Dalam kenyataannya pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk membiayai pelaksanaan program-program daerah dan kegiatan pembangunan dengan hanya mengandalkan potensi PAD. Bantuan pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan di daerah. Sehingga

diharapkan dengan adanya otonomi daerah pertumbuhan ekonomi daerah semakin kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1975 sudah mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Namun dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997). Desentralisasi fiskal yang tidak sekedar dekonsentrasi, baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah “Money Follows Functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah merupakan mekanisme transfer Pusat ke daerah, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya PAD dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, karena berasal dari

pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga belum mengizinkan penerbitan utang daerah.

Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Selama tahun 2001 – 2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan (Mahi, 2005). Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (equalizing transfer) (Ehtisham, 2002). Secara umum dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah terdiri dari bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (specific grant) (Davey, 1998). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (block grants) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Pada awal penerapannya, DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai pemda (Isdijoso dan Wibowo, 2002). Sedangkan penggunaan DAK (specific grants) telah ditentukan oleh Pusat dengan kewajiban daerah penerima harus menyediakan 10 persen dana pendamping.

2.2.2 Kebijakan Dana Desa

Menurut UU No 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5 Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas

wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota

Rata-rata Dana Desa setiap provinsi menurut pasal 11 PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap kabupaten/Kota dihitung dengan cara:

- a. pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN $\times [(30\% \times \text{persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional}) + (20\% \times \text{persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional}) + (50\% \times \text{persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional})]$ untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota
- b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota
- c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi
- d. Jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus)

Menurut PP No 60 tahun 2014 pasal 19, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Riset
1	Roziana Ainul Hidayati	Analisis Potensi Desa Berbasis Indeks	Indeks Pembangunan Desa, Potensi Desa, MDG's	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil kajian IPD di wilayah pesisir Kabupaten

		Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Kabupaten Gresik		Gresik tepatnya di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng diketahui Kategori Desa Berkembang di Kecamatan Ujung Pangkah. Rata-rata variabel yang tertinggal hampir di seluruh desa di Kecamatan Ujung Pangkah adalah variabel Sarana Olah Raga dan Sarana Transportasi. Sedangkan variabel yang rata-rata sangat baik di seluruh desa di Kecamatan Ujung Pangkah adalah infrastruktur energi, kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
2	Bambang Kuncoro, Joko Tri Nugraha, Retno Dewi Pramodia Ahsani	Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa Di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang	Balesari, Desa Wisata, Indeks Pembangunan Desa	Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan hasil:(1) Penghitungan potensi desa Balesari menggunakan Indeks Pembangunan Desa sebesar 48,72119 artinya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim; (2) Kebijakan pemerintah daerah dalam mengontrol pengembangan wisata di Desa Balesari belum ada; (3) Kegiatan masyarakat dalam berkebun salak serta memelihara ternak dapat dikemas menjadi salah satu atraksi wisata.
3	Muhtarom, M.Sc, Nurhadi KusumaM.Pd.I, Eri Purwanti, M.Pd	Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	Indeks Pembangunan Desa, Pembangunan Desa	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Diskriptif. Analisis penelitian yang digunakan yaitu analisis triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kecamatan Gadingrejo masuk dalam Klasifikasi Desa Berkembang yakni 87 %. Angka Indeks Ketahanan Sosial menjadi Indikator yang paling tinggi dalam realisasi spembangunan desa di kecamatan Gadingrejo yaitu 0,71. Hal ini menunjukkan rata-rata desa di kecamatan gadingrejo ketahanan sosialnya/pembangunan sosialnya

				berada dalam kalsifikasi Maju. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di gadingrejo mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mendorong ketahanan sosial.
4	Agus Nyoman Astika, Nyoman Sri Subawa	Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun, Pembangunan Desa	Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan sumber data dari dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah : (1) tahapan pelaksanaan pembangunan di Desa Penataan tidak sesuai peraturan perundangan; (2) pembangunan yang dilaksanakan mempengaruhi ketercapaian tujuan pembangunan Desa Penataan; (3)Tata kelola pemerintahan desa mempengaruhi keberhasilan pembangunan; dan (4)tidak adanya Pendapatan Asli Desa menyebabkan adanya ketergantungan anggaranpembangunan.
5	Dwi Nisa'ul Husna	Analisis Indikator Indeks Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa	Metode yang digunakan yaitu metode pengukuran IPD yang dikeluarkan oleh BPS dan BAPPENAS pada 2014 dengan menggunakan 42 indikator yang dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu: (1) pelayanan dasar; (2) kondisi infrastruktur; (3) aksesibilitas/transportasi; (4) pelayanan umum; dan (5) penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan untuk wilayah, penulis membagi menjadi 3, yaitu wilayah pegunungan, pedesaan, dan pinggiran dengan 36 desa sebagai sampel. Hasil ananlisis menunjukkan skor IPD Kabupaten Magelang tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan namun hanya 0,05. Tahun 2014 IPD berada pada angka 64,24 dan meningkat menjadi 64,29 pada 2018. Dari 5 dimensi, pelayanan dasar dan aksesibilitas/transportasi mengalami penurunan sedangkan kondisi infrastruktur, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan meningkat. Angka IPD menunjukkan bahwa Kabupaten

				Magelang belum mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah Desa diharapkan lebih memberdayakan masyarakat desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan agar hasil pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan tujuan pembangunan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
6	Muhammad Nurjaya, Mustafa Mustafa	Menakar Kemampuan Berdesa Dengan Indeks Pembangunan Desa Di Kabupaten Maros	Indeks Pembangunan Desa	Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Mix Mhetod kombinasi antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah desa tertinggal di Kabupaten Maros sebanyak 6 desa sedangkan desa berkembang sebanyak 69 desa sedangkan desa mandiri sebanyak 5 desa dengan total desa yang ada di Kabupaten Maros 80 Desa. Dimensi yang digunakan untuk melihat status desa di Kabupaten Maros memiliki kondisi yang tidak merata dengan persentase tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi 83.00%, penyelenggaraan pemerintahan 72.69%, pelayanan dasar 65.27%, pelayanan umum 52,77% serta yang paling rendah adalah kondisi infrastruktur 51.00%.
7	Arya Yahya, Riska Eka Agustina	Pembangunan Desa dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Indonesia	Pembangunan Desa, Tingkat Kemiskinan	Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis regresi linear bergandamenunjukkan bahwa variabel pembangunan desa secara statistik signifikan menurunkan tingkat kemiskinankabupaten. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan korelasi antara variabelpembangunan desa dan tingkat kemiskinan kabupaten di bagian timur Indonesia lebih besardibandingkan di bagian barat Indonesia.Pembangunan di wilayah

				pedesaan perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal menuju desa berkembang dan mandiri.
--	--	--	--	--

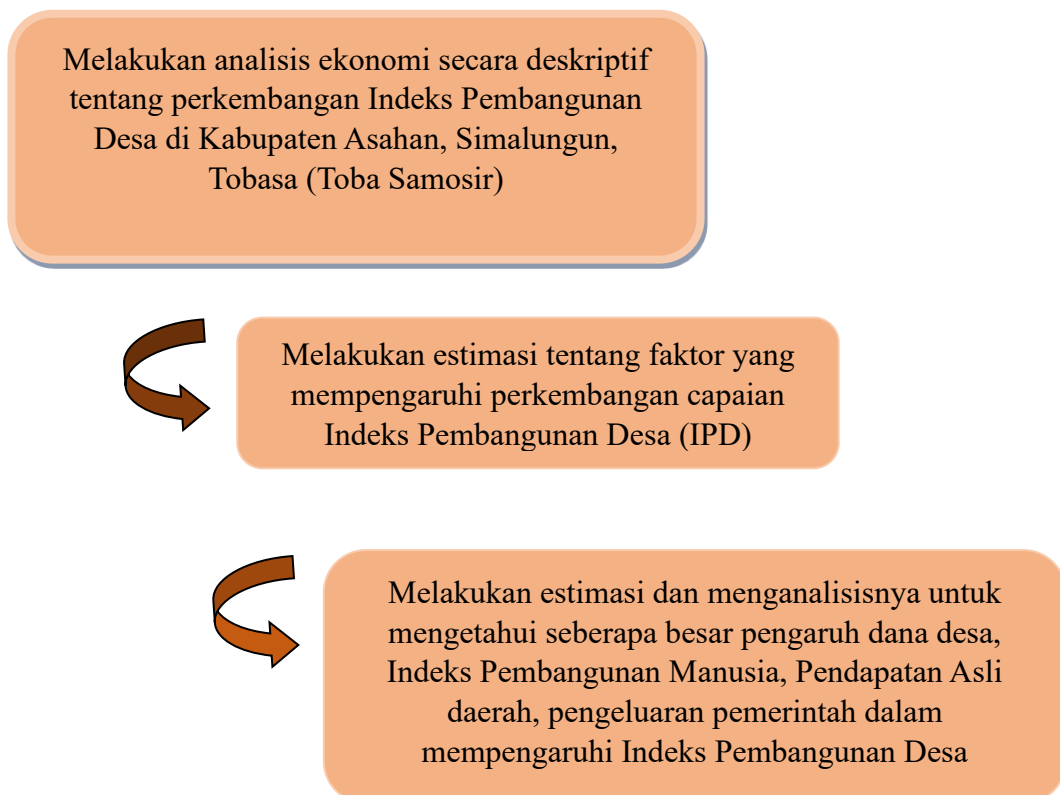
Sumber: Olahan Penulis, 2024

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1 Tahap Penelitian

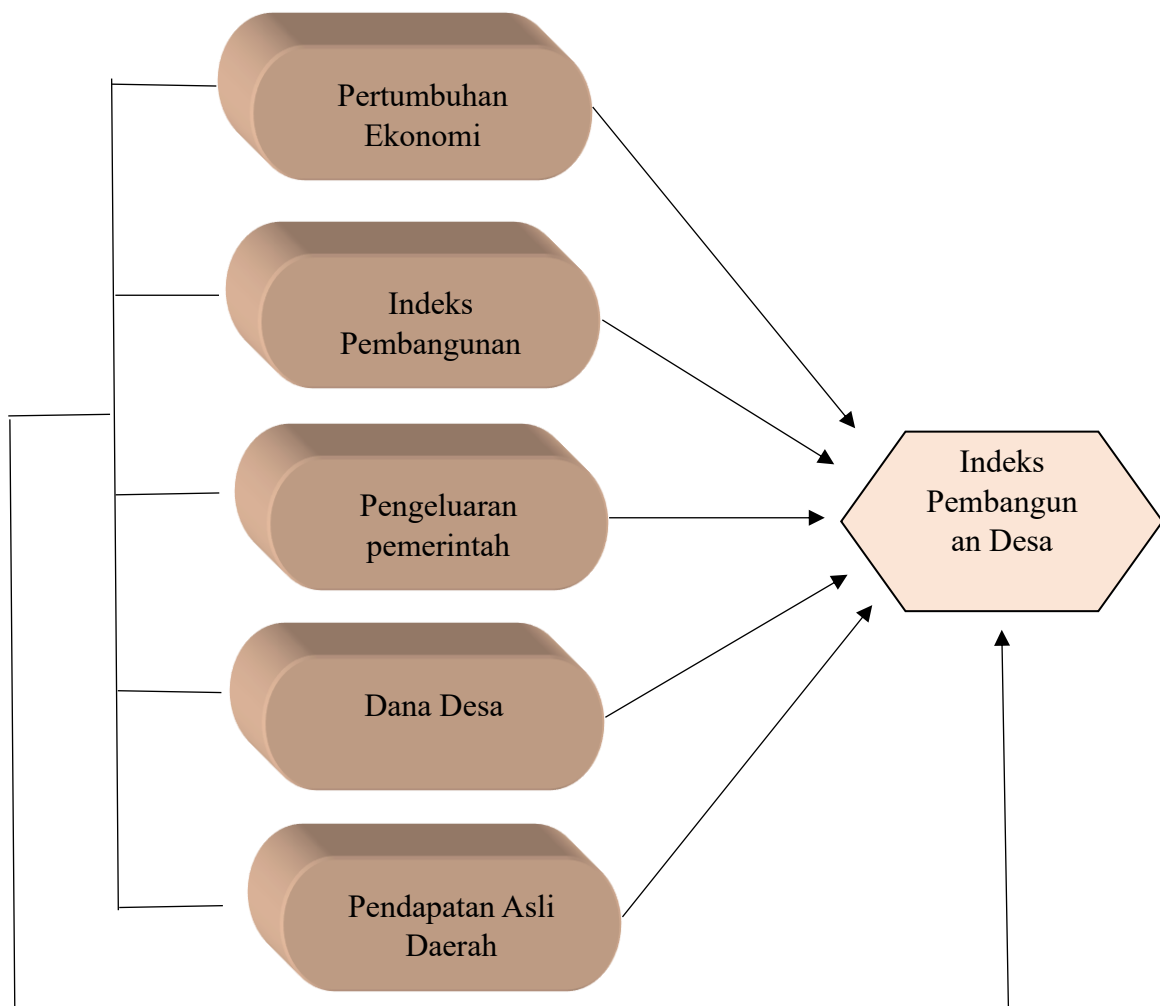
Beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa yaitu Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah dilakukan estimasi baru melihat bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Desa di 3 Kabupaten provinsi Sumatera Utara.

2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian



Gambar 2. 3 Kerangka Analisis Penelitian

2.4.3 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi Terkait Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa



Gambar 2. 4 Kerangka Konseptual Model Ekonometrik

Dalam Model ini, variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah, Dana Desa, dan pendapatan Asli Daerah merupakan variable bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Desa yang merupakan variable terikat.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Desa.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Desa.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Desa.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa.
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis pengaruh antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang disajikan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Data dalam penelitian ini berjenis data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section*.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: Indeks Pembangunan Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Model Ekonometrika

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Indeks Pembangunan Desa	Tingkat kemajuan desa (satuan persen)	Variabel terikat	www.bps.go.id
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator keberhasilan dan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang (satuan persen)	Variabel Bebas	www.bps.go.id
Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat pembangunan kualitas hidup manusia (satuan persen)	Variabel bebas	www.bps.go.id
Pengeluaran Pemerintah	pendapatan yang diperoleh pemerintah suatu daerah dari sumber daya daerah itu sendiri (satuan rupiah)	Variabel bebas	www.djpk.ke-menkeu.go.id
Dana Desa	merujuk pada uang yang dihabiskan pemerintah untuk barang dan jasa atau item lainnya (satuan milyar rupiah)	Variabel bebas	www.djpk.ke-menkeu.go.id
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan yang dihasilkan suatu daerah (satuan milyar rupiah)	Variabel bebas	www.djpk.ke-menkeu.go.id

Sumber: Olahan Penulis, 2024

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di tiga kabupaten provinsi Sumatera Utara yaitu Simalungun, Asahan dan Toba Samosir.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan direncanakan selama 2 bulan dimulai dari Mei 2024 hingga Juni 2024.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah di kumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data seri waktu (*time series* data) selama periode tahun 2014, 2018 dan 2022 dengan data kerat silang (*cross-section* data) yang diambil dari 3 kabupaten di Sumatera Utara yaitu Simalungun, Asahan dan Tobasa.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian keuangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *website-website* resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian keuangan dengan kurun waktu selama 3 tahun (2014, 2018 dan 2022).

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tobasa

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Simalungun, Asahan dan Toba Samosir.

3.6.2 Analisis Model Ekonometrika Untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Toba Samosir

a. Model Estimasi

Penelitian ini akan mengestimasi faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa. Berdasarkan penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan pendekatan kualitatif contohnya penelitian dari Roziana Ainul Hidayati (2021) dengan judul “Analisis Potensi Desa Berbasis Indeks Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Kabupaten Gresik”, namun yang membedakan penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Model Ekonometrika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPD_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PP_{it} + \beta_4 DD_{it} + \beta_5 PAD_{it} + \epsilon_{jt}$$

Dimana:

IPD_{it} : Indeks Pembangunan Desa

PE_{it} : Pertumbuhan Ekonomi

IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia

PP_{it} : Pengeluaran Pemerintah

DD_{it} : Dana Desa

PAD_{it} : Pendapatan Asli Daerah

β_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien

it : Unit Waktu (2014, 2018 dan 2022) dan objek 3 kabupaten (Simalungun, Asahan dan Tobasa)

ε_t : *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesa penelitian.

b. Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variabel yang diamati menggunakan data panel gabungan antara data *time series* dengan kurun waktu 2015-2023 dan data *cross section* di 3 kabupaten Sumatera Utara yaitu Simalungun, Asahan dan Tobasa. Analisis *trend* dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Square*) dalam bentuk regresi linier berganda (*multiple regression model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami. Asumsi yang mendasari model regresi linier menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata *disturbance term* = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara *disturbance term* $COV(\varepsilon_t, \varepsilon_j) = 0 : I \neq j$

3. Sifat *homoscedasticity* dari *disturbance term* $\text{Var}(\epsilon^i) = \sigma^2$
4. *Covariance* antar ϵ^i dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan
6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.

Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi gauss-markov), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (best linear unbiased estimator) (Gujarati, 2016).

c. Tahapan Analisis

1. Pemilihan Model Terbaik

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel mana yang sebaiknya digunakan, apakah Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun ketentuan untuk pengujian F-Stat/Uji Chow yaitu sebagai berikut:

1. Apabila nilai probability dari Cross-section F dan Cross section Chi-square $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model regresi yang dipilih adalah Common Effect Model (CEM).
2. Apabila nilai probability dari Cross-section F dan Cross- section Chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model dengan tujuan untuk menentukan model mana yang sebaiknya digunakan. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun ketentuan untuk pengujian Hausman yaitu sebagai berikut:

1. Apabila nilai probability dari Cross-section random $> 0,05$ maka H_0 diterima model regresi yang dipilih adalah Random Effect Model (REM).
2. Apabila nilai probability dari Cross-section random $< 0,05$ maka H_0 ditolak model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah Random Effect Model lebih baik dari Common Effect Model. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun ketentuan untuk pengujian Lagrange Multiplier yaitu sebagai berikut:

1. Apabila nilai cross section Breusch-pangan $> 0,05$ maka H_0 diterima,

sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Common Effect Model (CEM).

2. Apabila nilai cross section Breusch-pangan $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).

2. penaksiran

a. Kolerasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai $+1$. Nilai r -1 atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam persamaan regresi yang dihasilkan. Misalnya, nilai (R^2) dalam suatu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan pengaruh (fungsional) antara variabel Y sebagai variabel

dependen dan variabel X sebagai variabel independen, yang diperoleh dari hasil perhitungan tertentu adalah 0,85. Ini artinya bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh adalah 85% sedangkan sisanya 15% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati atau berada di luar persamaan. (Roswita Hafni, 2024)

3. Pengujian (*Test diagnostic*)

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013). Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual terhadap Indeks pembangunan Desa (IPD). Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

- Hipotesis $H_0 : \beta_1 - \beta_5 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa tahun 2015-2023).
- Hipotesis $H_a : \beta_1 - \beta_5 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa tahun 2015-2023).

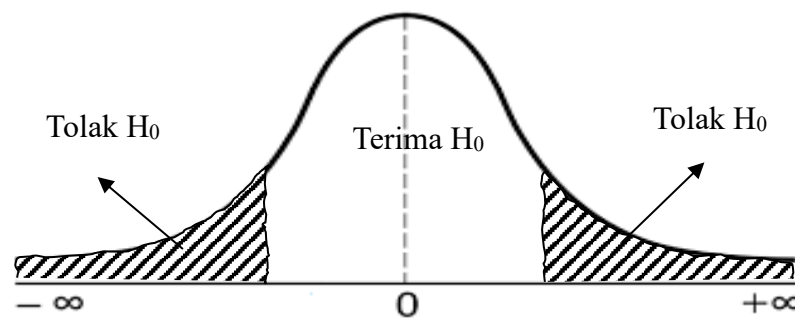
2. Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah:

$$t_h = \beta_i / Se_{\beta_i}$$

Nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel = $\pm t (\alpha / 2, n - 1)$.

3. Kriteria Uji

Terima H_0 jika $-ttabel < thitung < +ttabel$, hal lain tolak H_0 atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0 .

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh Peertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan atau bersamaan terhadap Indeks pembangunan Desa (IPD). Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

- Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa tahun 2015-2023).
 - Hipotesis $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa tahun 2015-2023).
2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$F = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana:

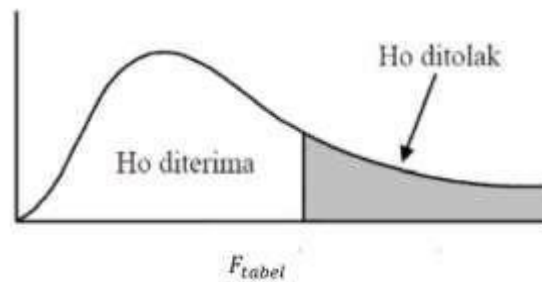
k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat kesalahan α pada tingkat 1%, 5%, 10%, dan 15%.

3. Kriteria Uji

Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

a) Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan

memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai p-value dan koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kemampuan variabel bebas menjelaskan perilaku variabel terikatnya. (Setri Tri Wahyudi, 2016) Kriterianya adalah jika p-value signifikan maka dipastikan terbebas dari multikolinearitas.

b) Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *probability*

Observation R -Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

c) Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < \textit{Durbin Watson} < 4$ maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2003).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Geografis Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10° - 40° Lintang Utara dan 980° - 1000° Bujur Timur, Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kelompok wilayah/ kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, Pantai Timur, dan Kepulauan.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera, Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km² atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km² atau sekitar 8,26 persen, Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara memiliki total kabupaten/kota sebanyak 33, dimana dalam penelitian saya hanya menggunakan 3 kabupaten yaitu kabupaten Simalungun, Asahan, dan Tobasa. Kabupaten tersebut memiliki potensi masing-masing yang mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten tersebut. Setiap kabupaten terletak secara berdekatan, Simalungun dan Asahan terletak di bagian Pantai Timur sedangkan Tobasa terletak di Dataran Tinggi.

4.1.2 Demografis Sumatera Utara

A. Penduduk/Demografi

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Tahun 2023 berjumlah 15.386.640 jiwa. Sementara itu hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencapai 14.799.361 jiwa.

Kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 203 jiwa per km² kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 212 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 2010–2020 adalah 1,28 persen per tahun, dan pada tahun 2020–2023 menjadi 1,43 persen per tahun. Pada Tahun 2023 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.386.640 jiwa yang terdiri dari 7.721.314 jiwa penduduk laki–laki dan 7.665.326 jiwa perempuan atau dengan ratio jenis kelamin/sex ratio sebesar 100,73.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumatera Utara

Kabupaten	Jumlah Penduduk		
	2014	2018	2022
Simalungun	844,033	862,228	1,021,615
Asahan	699,720	724,379	787,681
Tobasa	178,568	182,673	212,133
Sumatera Utara	13,766,851	14,415,391	15,115,206

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id)

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk di beberapa kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 hingga 2022. Di Kabupaten Simalungun, jumlah penduduk meningkat dari 844.033 pada tahun 2014 menjadi 1.021.615 pada tahun 2022. Kabupaten Asahan juga mengalami peningkatan dari 699.720 pada tahun 2014 menjadi 787.681 pada tahun 2022. Di Kabupaten Tobasa, jumlah penduduk bertambah dari 178.568 pada tahun 2014 menjadi 212.133 pada tahun 2022. Secara keseluruhan, di Provinsi Sumatera Utara, jumlah penduduk meningkat dari 13.766.851 pada tahun 2014 menjadi 15.115.206 pada tahun 2022.

B. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022, TPAK di Sumatera Utara sebesar 69,53 persen kemudian naik menjadi 71,06 persen pada tahun 2023. Pada Tahun 2023 angkatan kerja di Sumatera Utara sebagian besar berpendidikan SMA. Persentase golongan ini mencapai 44,36 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD kebawah dan SMP masing-masing sekitar 23,69 persen, 18,70 persen, sedangkan 13,25 persen berpendidikan di atas SMA.

Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (37,67%) penduduk yang bekerja adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha sendiri sebesar 22,23 persen, sedangkan penduduk yang berusaha dibantu pekerja keluarga mencapai 13,72 persen, sehingga hanya 3,81 persen penduduk yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap.

Tabel 4. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas (Persen)		
	2014	2018	2022
Simalungun	68,41	73,28	69,91
Asahan	60,04	67,63	65,68
Tobasa	78,13	79,89	79,04
Sumatera Utara	67,07	71,82	69,53

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id)

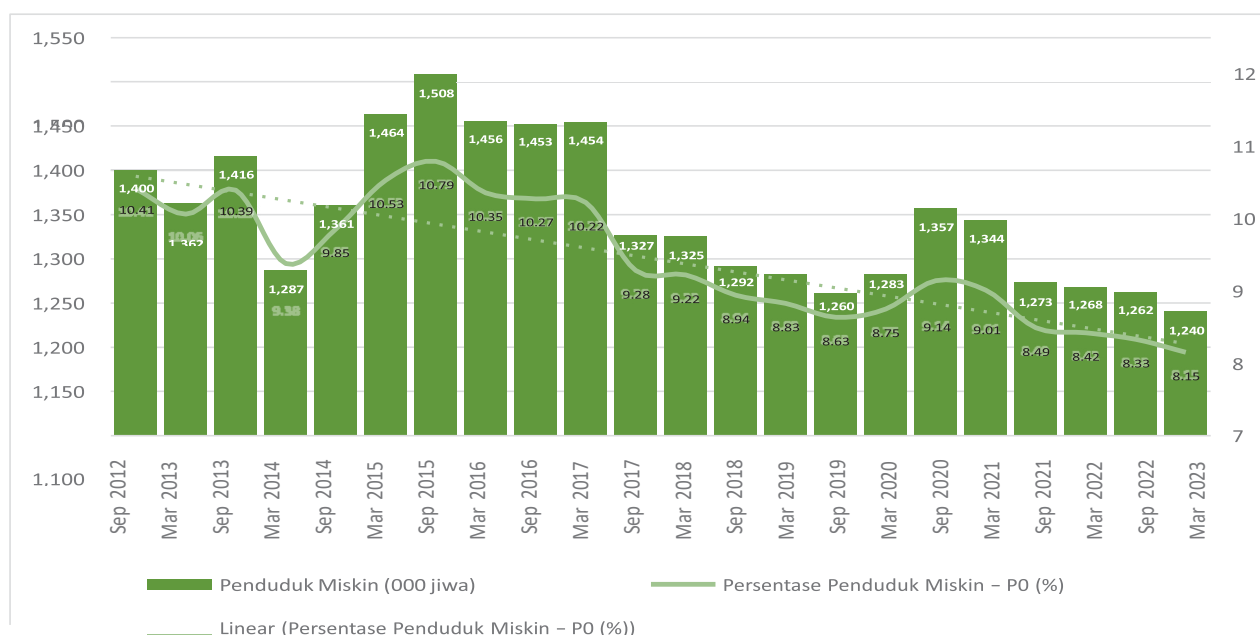
Berdasarkan tabel diatas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas di beberapa kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi selama periode 2014 hingga 2022. Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan TPAK dari 68,41% pada tahun 2014 menjadi 73,28% pada tahun 2018, namun turun menjadi 69,91% pada tahun 2022. Kabupaten Asahan juga menunjukkan tren peningkatan dari 60,04% pada tahun 2014 menjadi 67,63% pada tahun 2018, namun menurun sedikit menjadi 65,68% pada tahun 2022.

Sebaliknya, Kabupaten Tobasa menunjukkan TPAK yang relatif stabil, dengan angka 78,13% pada tahun 2014, sedikit naik menjadi 79,89% pada tahun 2018, dan sedikit turun menjadi 79,04% pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatera Utara, yang mengalami peningkatan dari

67,07% pada tahun 2014 menjadi 71,82% pada tahun 2018 dan kemudian turun menjadi 69,53% pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa Tobasa memiliki TPAK yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi, sedangkan Asahan memiliki TPAK yang lebih rendah. Simalungun, meskipun fluktuatif, menunjukkan TPAK yang umumnya mendekati rata-rata provinsi.

4.1.3 Perkembangan Indikator Sosial

A. Kemiskinan



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 4. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara

Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara secara linier cenderung menurun meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Kenaikan tingkat kemiskinan pada fase pertama, khususnya pada Maret 2015 hingga Maret 2017 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada fase kedua, periode Maret 2020 hingga

September 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Sebaliknya keadaan sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, hingga kembali ke level sebelum terjadinya pandemi.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 4. 3 Angka Kemiskinan

Kabupaten	Persentase Kemiskinan		Garis Kemiskinan (RP)		Indeks Kedalaman Kemiskinan		Indeks Keparahannya Kemiskinan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Simalungun	8,26	7,9	441 744	467 926	1,69	1,00	0,5	0,21
Asahan	8,64	8,2	397 944	427 293	1,22	0,77	0,3	0,13
Tobasa	8,89	8	465 681	496 950	1,23	1,02	0,3	0,18
Sumatera Utara	8,42	8,2	561 004	602 999	1,36	1,26	0,3	0,32

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Kemiskinan di beberapa kabupaten di Sumatera Utara untuk tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren yang umumnya positif. Persentase kemiskinan di Kabupaten Simalungun menurun dari 8,26% pada 2022 menjadi 7,9% pada 2023, di Asahan dari 8,64% menjadi 8,2%, di Tobasa dari 8,89% menjadi 8%, dan di

tingkat provinsi Sumatera Utara dari 8,42% menjadi 8,2%. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi di daerah-daerah tersebut. Garis kemiskinan, yang menunjukkan batas pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkat di semua wilayah, menunjukkan peningkatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penduduk. Indeks kedalaman kemiskinan, yang mengukur sejauh mana rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, juga menunjukkan penurunan di Simalungun, Asahan, dan Tobasa, tetapi sedikit meningkat di tingkat provinsi. Indeks keparahan kemiskinan, yang mengukur ketidakmerataan pengeluaran di antara penduduk miskin, menurun di kabupaten-kabupaten tersebut, menunjukkan peningkatan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat miskin, meskipun mengalami sedikit peningkatan di tingkat provinsi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di sebagian besar wilayah, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi di tingkat provinsi.

B. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per

kapita yang disesuaikan. Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 75,13.

Tabel 4. 4 IPM Sumatera Utara dan Komponen

Komponen	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	73,39	73,67
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,31	13,48
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,71	9,82
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)	10.848.000	11.049.000
IPM	74,51	75,13

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara 2023 (www.sumut.bps.go.id)

Umur harapan hidup saat lahir di Sumatera Utara mencapai 73,67. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir tahun 2023 dapat bertahan hidup hingga usia 73,67 tahun. Dari sisi pendidikan, RLS Sumatera Utara sebesar 9,82 artinya secara rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Sumatera Utara telah menempuh pendidikan hingga 9,82 tahun atau setara dengan kelas 3 SLTP. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,48 tahun atau mencapai Diploma I. Pada aspek ekonomi, rata-rata pengeluaran mencapai 11,05 juta rupiah per kapita per tahun. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten	2014	2018	2022
Asahan	67.51	69.49	71.13
Simalungun	70.89	72.59	73.77
Tobasa	72.79	74.48	75.96
Sumatera Utara	68.87	71.18	72.71

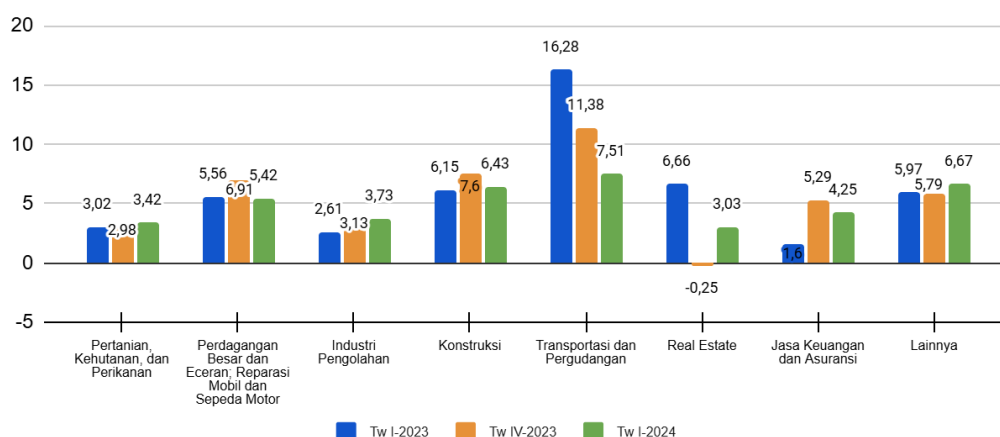
Sumber: Olahan Penulis 2024 (www.sumut.bps.go.id)

Indeks Pembangunan Manusia untuk Kabupaten Asahan, Simalungun, dan Tobasa dalam provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2014 hingga 2022. Kabupaten Asahan mencatat indeks pembangunan manusia 67.51 pada tahun 2014, yang meningkat menjadi 69.49 pada tahun 2018, dan mencapai 71.13 pada tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Simalungun memiliki indeks pembangunan manusia 70.89 pada tahun 2014, meningkat menjadi 72.59 pada tahun 2018, dan mencapai 73.77 pada tahun 2022. Kabupaten Tobasa menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 72.79 pada tahun 2014, menjadi 74.48 pada tahun 2018, dan mencapai 75.96 pada tahun 2022. Secara keseluruhan, provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren positif dengan indeks pembangunan yang meningkat dari 68.87 pada tahun 2014 menjadi 71.18 pada tahun 2018, dan mencapai 72.71 pada tahun 2022. Ketiga kabupaten tersebut memiliki nilai IPM diatas rata-rata nasional, ini menunjukkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut mengalami perbaikan.

4.1.3 Perkembangan Indikator Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I Tahun 2024 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 273,49 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 152,82 triliun.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2024 terhadap Triwulan I Tahun 2023 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,63 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi 7,85 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,51 persen; Jasa Pendidikan sebesar 7,36 persen; serta Konstruksi sebesar 6,43 persen. Sementara itu, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Industri Pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 5,42 persen dan 3,73 persen.

Tabel 4. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten	2014	2018	2022
Asahan	5.88	5.61	4.66
Simalungun	5.33	5.18	4.68
Tobasa	4.24	4.96	4.24
Sumatera Utara	5.23	5.18	4.73

Sumber: Olahan Penulis, 2024 (www.sumut.bps.go.id)

Data tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi (dalam persentase) dari beberapa kabupaten di Sumatera Utara selama periode tahun 2014 hingga 2022. Kabupaten Asahan mengalami penurunan dari 5.88% pada tahun 2014 menjadi 4.66% pada tahun 2022. Simalungun juga mengalami penurunan yang signifikan dari 5.33% menjadi 4.68% dalam periode yang sama. Di sisi lain, Tobasa mengalami fluktuasi dengan tingkat pertumbuhan mencapai 4.96% pada tahun 2018 dan kembali turun ke 4.24% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurun dari 5.23% pada tahun 2014 menjadi 4.73% pada tahun 2022, mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi daerah-daerah tersebut selama delapan tahun terakhir.

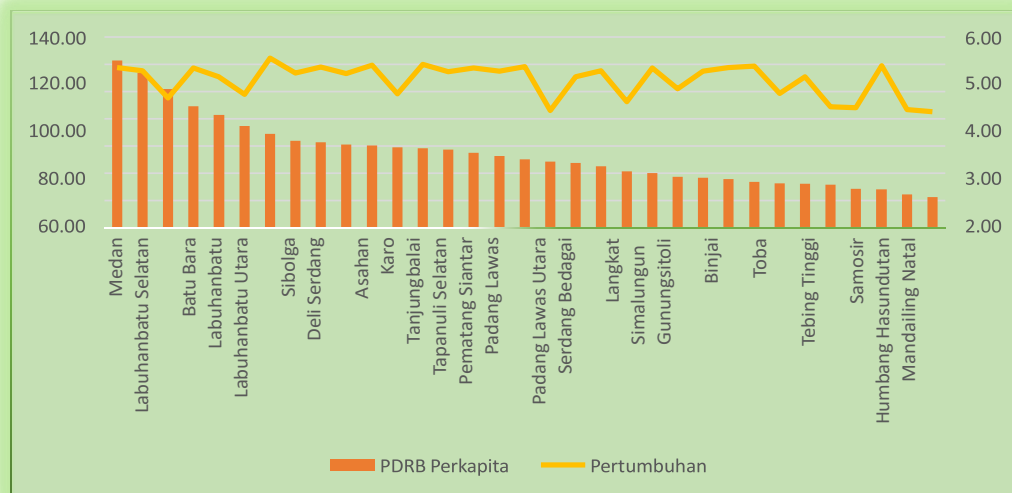
Beberapa lapangan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun, Asahan, dan Tobasa yang juga mendukung ekonomi lokal yaitu Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Industri Pengolahan, Pariwisata, dan Infrastruktur dan Konstruksi. Nilai PDRB sektor tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya di kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa. Melalui diversifikasi sektor ekonomi dan pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan, Kabupaten Simalungun, Asahan, dan Tobasa dapat

mengoptimalkan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

B. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita Sumatera Utara adalah ukuran ekonomi yang mengukur nilai produksi barang dan jasa bersih yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Ini memberikan gambaran tentang pendapatan rata-rata per individu dalam daerah tersebut.

Secara spesifik untuk Sumatera Utara, PDRB per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran relatif penduduk daerah ini. Perubahan dalam PDRB per kapita dapat menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi dan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 4. 3 PDRB ADHB per kapita dan pertumbuhannya di Provinsi Sumatera Utara , 2023G pertumbuhannya di Provinsi Sumatera Utara , 2023

Jika kita mengamati besaran PDRB per kapita kabupaten/ kota, ada sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara. Kabupaten/kota tersebut mencakup dua kota yang ada di Sumatera Utara yaitu Kota Medan (122,59 juta rupiah) sebagai kota dengan PDRB per kapita tertinggi, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (113,62 juta rupiah). Serta lima kabupaten yaitu, Kabupaten Batu Bara (101,68 juta rupiah), Kabupaten Labuhanbatu (89,06 juta rupiah), Kabupaten Labuhanbatu Utara (82,79 juta rupiah), Kota Sibolga (74,74 juta rupiah), dan Kabupaten Deli Serdang (68,92 juta rupiah). Kabupaten Nias Selatan menempati posisi dengan PDRB per kapita terendah yaitu hanya 22,42 juta rupiah per kapita per tahun dengan nilai pertumbuhan PDRB per kapitanya sebesar 1,61 persen.

Tabel 4. 7 PDRB Perkapita Kabupaten Provinsi Sumater Utara

Kabupaten	2014	2018	2022
Asahan	34,670,000.00	47,854,663.00	58,871,738.35
Simalungun	30,020,730.00	41,038,390.00	46,370,490.00
Tobasa	28,971,533.75	39,204,402.00	42,396,144.44
Sumatera Utara	37,913,895.62	51,427,494.00	62,922,257.56

Sumber: Olahan Penulis, 2024 (BPS Sumatera Utara)

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita untuk beberapa kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2014 hingga 2022. Kabupaten Asahan mencatat kenaikan PDRB dari Rp 34,670,000.00 pada tahun 2014 menjadi Rp 58,871,738.35 pada tahun 2022. Kabupaten Simalungun juga mengalami peningkatan dari Rp 30,020,730.00 pada tahun 2014 menjadi Rp 46,370,490.00 pada tahun 2022. Kabupaten Tobasa menunjukkan tren serupa dengan PDRB yang naik dari Rp 28,971,533.75 pada

tahun 2014 menjadi Rp 42,396,144.44 pada tahun 2022. Secara keseluruhan, Sumatera Utara juga menunjukkan peningkatan PDRB per kapita yang signifikan dari Rp 37,913,895.62 pada tahun 2014 menjadi Rp 62,922,257.56 pada tahun 2022. Angka-angka ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah tersebut selama periode delapan tahun.

C. Gini Ratio

Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2000).

Tabel 4. 8 Gini Ratio Kabupaten Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten	2014	2018	2022
Asahan	0.2768	0.2912	0.2550
Simalungun	0.3557	0.2897	0.2660
Tobasa	0.3017	0.3279	0.3050
Sumatera Utara	0.3106	0.3176	0.3120

Sumber: BPS Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id)

Gini ratio dari Kabupaten Asahan, Simalungun, dan Tobasa serta rata-rata Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perubahan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan selama periode 2014 hingga 2022. Pada tahun 2014, Gini ratio Sumatera Utara berada pada angka 0.3106, yang meningkat menjadi 0.3176 pada tahun 2018, sebelum akhirnya menurun menjadi 0.312 pada tahun 2022.

Di tingkat kabupaten, Asahan menunjukkan penurunan yang signifikan dari 0.2768 pada tahun 2014 menjadi 0.255 pada tahun 2022, meskipun sempat mengalami peningkatan menjadi 0.2912 pada tahun 2018. Kabupaten Simalungun juga mengalami penurunan ketimpangan dari 0.3557 pada tahun 2014 menjadi 0.266 pada tahun 2022, setelah sebelumnya mencatat penurunan menjadi 0.2897 pada tahun 2018. Sementara itu, Tobasa menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil, dengan Gini ratio meningkat dari 0.3017 pada tahun 2014 menjadi 0.3279 pada tahun 2018, dan kemudian menurun ke 0.305 pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, gini ratio menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di beberapa daerah di Sumatera Utara, terutama di Asahan dan Simalungun, meskipun ketimpangan di beberapa wilayah seperti Tobasa mengalami sedikit peningkatan sebelum kembali menurun. Penurunan Gini ratio di tahun 2022 mengindikasikan upaya-upaya yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di wilayah ini.

F. Inflasi

Tingkat inflasi yang moderat dan stabil dapat mendukung pembangunan daerah dengan mendorong konsumsi dan investasi serta mengurangi beban utang. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menghambat pembangunan dengan menurunkan daya beli, menciptakan ketidakpastian ekonomi, dan meningkatkan biaya produksi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang efektif diperlukan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 4. 9 Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi April 2024
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

KOTA	April 2024		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kab. Labuhan batu	110,41	5,78	-0,08
2. Kab. Karo	107,58	4,78	0,30
3. Kab. Deli Serdang	106,07	3,42	-0,14
4. Kota Sibolga	107,93	4,03	-0,08
5. Kota Pematang Siantar	106,92	3,92	-0,19
6. Kota Medan	106,21	3,89	-0,03
7. Kota Padang Sidempuan	107,75	4,73	0,33
8. Kota Gunungsitoli	105,78	3,93	-0,21
PROVINSI	106,59	3,96	-0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2024

Pada tahun 2024, inflasi di Sumatera Utara mengalami perkembangan yang signifikan. Pada bulan April 2024, inflasi year on year (yoy) tercatat sebesar 3,96% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,63. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,78%, sementara inflasi terendah ada di Kabupaten Deli Serdang dengan 3,42%.

Kabupaten Simalungun, Asahan, dan Tobasa yang terletak bersinggungan dengan Kota Pematang Siantar cenderung mengalami dampak langsung dari inflasi di kota tersebut karena keterkaitan ekonomi dan geografis yang erat. Pematang Siantar, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, mempengaruhi harga barang dan jasa di daerah sekitarnya melalui berbagai mekanisme. Barang-barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri yang dipasok melalui Pematang Siantar akan mengalami kenaikan harga jika inflasi terjadi di kota ini, yang kemudian diteruskan ke kabupaten-kabupaten tersebut. Selain itu, banyak penduduk dari

Simalungun, Asahan, dan Tobasa bekerja di Pematang Siantar, sehingga kenaikan biaya hidup di kota ini akan mengurangi pendapatan disposable mereka dan berdampak pada konsumsi di daerah asal mereka. Infrastruktur transportasi yang baik menghubungkan Pematang Siantar dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya, mempercepat transmisi inflasi melalui biaya transportasi yang meningkat. Akibatnya, harga barang dan jasa di Simalungun, Asahan, dan Tobasa akan cepat mengikuti perubahan harga di Pematang Siantar, menciptakan dampak inflasi yang menyebar dan dirasakan di seluruh wilayah tersebut.

4.2 Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Desa Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Simalungun, Asahan, dan Tobasa

4.2.1 Perkembangan Nilai IPD provinsi Sumatera Utara

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah suatu sistem pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan desa dalam suatu wilayah tertentu. ada 4 aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: (1) Kebutuhan Dasar; (2) Pelayanan Dasar; (3) Lingkungan; dan (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam bagian penjelasan dalam UU tersebut, kebutuhan dasar didefinisikan sebagai upaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sementara, pelayanan dasar antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan dalam pasal 78 tujuan pembangunan desa meliputi: (1) Kesejahteraan Masyarakat; (2) Kualitas Hidup; dan (3) Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui (1) Kebutuhan Dasar; (2) Sarana; (3) Prasarana; (4) Pengembangan Ekonomi Lokal; dan (5) Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan.

Menurut IPD desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu desa mandiri, desa berkembang dan desa tertinggal. Indeks Pembangunan Desa dibagi dalam 5 dimensi yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah.

1. Pelayanan Dasar

Mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.

2. Kondisi Infrastruktur

Mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

3. Aksesibilitas/Transportasi

Dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati/ walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota.

Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa 2018, dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi suatu kawasan berada di sekitar/dekat pusat- pusat pemerintahan.

4. Pelayanan Umum

Merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada

ketersediaan data Potensi Desa 2018. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel-variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.

5. Penyelenggaraan Pemerintah

Mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

Pengukuran Indeks Pembangunan Desa telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2014 dan 2018. Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa.

Tabel 4. 10 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Menurut Kabupaten/Kota, Dimensi IPD, Status IPD, dan Jumlah Desa di Sumatera Utara 2018

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nias	44,23	39,28	25,91	67,76	50,94	50,76	74,12	25,29	0,59	170
Mandailing Natal	55,67	53,77	37,09	82,03	50,62	60,09	23,61	75,86	0,53	377
Tapanuli Selatan	57,84	53,76	37,42	87,02	48,35	72,24	14,15	85,85	0,00	212
Tapanuli Tengah	55,19	56,71	36,03	80,06	46,66	56,96	26,42	73,58	0,00	159
Tapanuli Utara	55,00	51,97	43,09	78,65	41,63	60,85	28,63	70,95	0,41	241
Toba Samosir	56,20	50,64	46,37	77,95	44,58	66,59	21,21	77,92	0,87	231
Labuhan Batu	64,16	65,55	49,15	77,95	64,81	68,35	1,33	90,67	8,00	75
Asahan	66,24	68,73	55,14	77,22	56,94	73,26	0,56	93,79	5,65	177
Simalungun	62,51	61,35	51,25	81,05	50,42	69,46	5,18	91,19	3,63	386
Dairi	59,98	59,18	42,90	84,74	45,86	69,76	9,32	89,44	1,24	161
Karo	63,74	62,66	46,83	91,41	48,56	69,62	6,18	89,96	3,86	259
Deli Serdang	65,66	66,35	54,90	81,83	55,76	68,20	6,84	72,11	21,05	380
Langkat	66,41	68,12	55,19	78,78	55,21	75,34	0,83	92,08	7,08	240
Nias Selatan	40,66	36,58	22,99	65,64	44,90	42,83	80,39	19,61	0,00	459
Humbang Hasundutan	56,08	49,13	43,06	86,30	41,59	65,05	21,57	75,82	2,61	153
Pakpak Bharat	57,94	60,82	40,02	79,12	40,94	68,21	16,23	78,85	1,92	52
Samosir	58,84	51,54	39,67	79,46	42,15	66,57	30,47	68,75	0,78	128
Serdang Bedagai	64,69	65,73	56,57	76,38	53,88	69,31	3,38	89,87	9,75	237
Batu Bara	67,49	71,01	56,70	80,66	54,33	70,45	0,00	91,49	8,51	141
Padang Lawas Utara	46,33	39,62	30,90	72,91	48,18	50,58	60,36	39,38	0,26	386
Padang lawas	52,68	50,,19	35,54	77,72	50,52	55,10	39,93	59,08	0,99	303
Labuhan Batu Selatan	66,77	66,44	53,61	85,18	64,76	65,84	1,41	88,73	9,86	71
Labuhan Batu Utara	66,41	69,93	52,93	76,67	61,83	72,48	2,44	86,59	10,98	82
Nias Utara	46,43	44,83	22,40	70,38	54,92	53,65	60,07	33,93	0,00	112
Nias Barat	46,34	46,23	23,12	66,46	46,36	62,78	65,71	34,29	0,00	105
Padangsidempuan	64,17	68,32	44,82	92,08	48,60	59,96	2,38	95,24	2,38	42
Gunungsitoli	55,19	58,20	39,44	74,50	45,16	56,53	23,47	76,53	0,00	98
Sumatera Utara	56,62	54,94	41,71	78,33	49,76	62,43	27,02	69,03	3,68	5 437

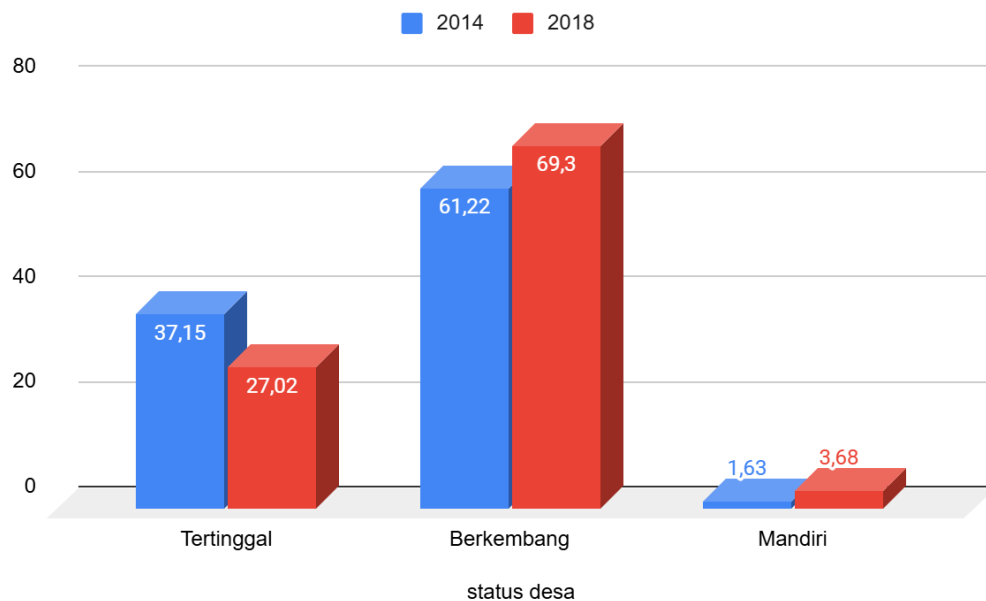
Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018 (www.sumut.bps.go.id)

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2018 untuk berbagai kabupaten di Sumatera Utara, kita dapat melihat variasi dalam berbagai dimensi pembangunan desa. IPD mencakup beberapa indikator seperti pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan

penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, Kabupaten Nias memiliki IPD terendah dengan nilai 44,23, menunjukkan bahwa desa-desa di Nias memiliki tantangan besar dalam berbagai dimensi pembangunan. Di sisi lain, Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu Selatan memiliki IPD yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 66,24 dan 66,77, menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam dimensi-dimensi tersebut.

Dari segi persentase desa menurut statusnya, banyak desa di Kabupaten Nias Selatan (80,39%) dan Nias Barat (65,71%) masih dalam kategori desa tertinggal, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pembangunan di wilayah ini. Sebaliknya, kabupaten seperti Batu Bara dan Padangsidempuan memiliki persentase tinggi desa yang berkembang dan mandiri. Sebagai contoh, Batu Bara memiliki 91,49% desa yang berkembang dan 8,51% desa yang mandiri, sedangkan Padangsidempuan memiliki 95,24% desa yang berkembang.

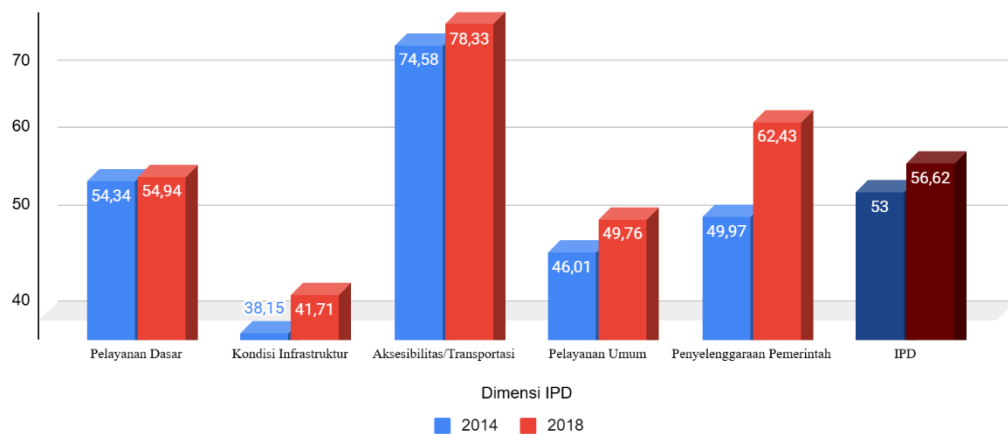
Secara keseluruhan, Sumatera Utara memiliki IPD rata-rata 56,62 pada tahun 2018, dengan variasi yang signifikan di antara kabupaten-kabupaten. Desa-desa di wilayah ini menunjukkan berbagai tingkat kemajuan dalam pembangunan desa, dengan beberapa kabupaten memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan infrastruktur, aksesibilitas, dan layanan dasar. Jumlah total desa di Sumatera Utara pada tahun 2018 adalah 5.437 desa, dengan berbagai status yang mencerminkan kemajuan pembangunan yang berbeda-beda di seluruh provinsi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, olahan penulis 2024. (www.bps.go.id)

Gambar 4. 4 Persentase Desa Menurut Status Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan 2018

Gambar tersebut menunjukkan perubahan status desa di Sumatera Utara antara tahun 2014 dan 2018, dengan tiga kategori: desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Pada tahun 2014, persentase desa tertinggal adalah 37,15%, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 27,02%, menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah desa tertinggal. Untuk desa berkembang, persentasenya meningkat dari 61,22% pada tahun 2014 menjadi 69,3% pada tahun 2018, menandakan adanya perbaikan dan perkembangan yang signifikan di banyak desa. Terakhir, desa mandiri mengalami peningkatan dari 1,63% pada tahun 2014 menjadi 3,68% pada tahun 2018, menunjukkan bahwa lebih banyak desa telah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, gambar tersebut menggambarkan tren positif dalam pembangunan desa di Sumatera Utara, dengan penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa berkembang dan mandiri.



Sumber: Badan Pusat Statistik, olahan penulis 2024. (www.bps.go.id)

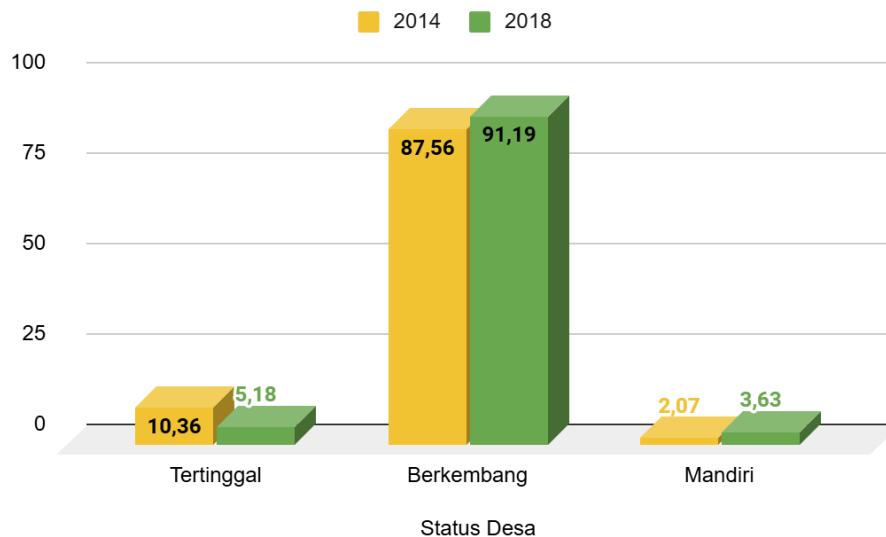
Gambar 4. 5 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utara

Gambar tersebut menggambarkan perbandingan dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) antara tahun 2014 dan 2018. Pada dimensi Pelayanan Dasar, terjadi sedikit peningkatan dari 54,34 pada tahun 2014 menjadi 54,94 pada tahun 2018. Kondisi Infrastruktur juga menunjukkan peningkatan dari 38,15 pada tahun 2014 menjadi 41,71 pada tahun 2018. Dimensi Aksesibilitas/Transportasi mengalami peningkatan signifikan dari 74,58 pada tahun 2014 menjadi 78,33 pada tahun 2018, yang merupakan peningkatan terbesar di antara semua dimensi yang diukur.

Pada dimensi Pelayanan Umum, terjadi peningkatan dari 46,01 pada tahun 2014 menjadi 49,76 pada tahun 2018. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 49,97 pada tahun 2014 menjadi 62,43 pada tahun 2018. Secara keseluruhan, IPD menunjukkan peningkatan dari 53 pada tahun 2014 menjadi 56,62 pada tahun 2018. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap dimensi IPD mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2018, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada dimensi Aksesibilitas/Transportasi dan

Penyelenggaraan Pemerintah, yang mencerminkan perbaikan dalam infrastruktur dan tata kelola pemerintahan di desa-desa di Sumatera Utara.

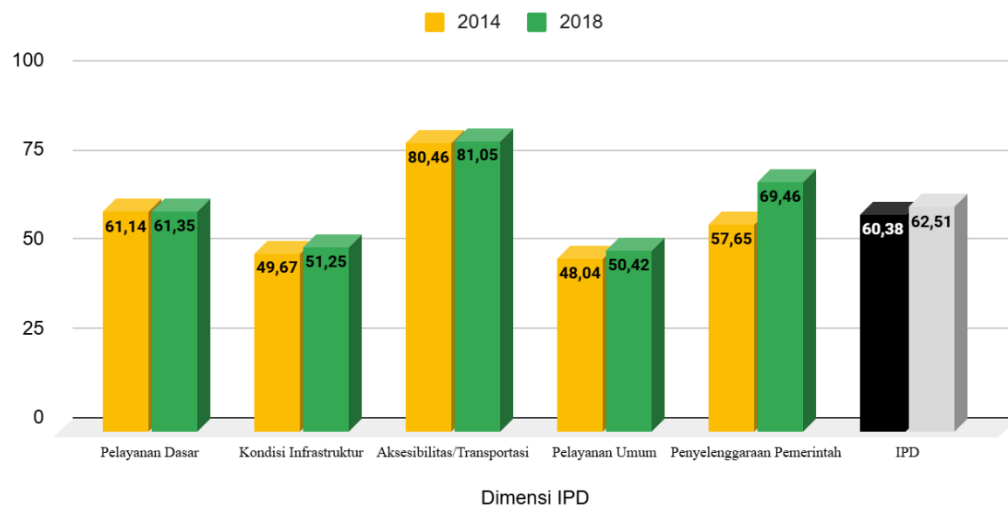
4.2.2 Perkembangan Nilai IPD Kabupaten Simalungun



Sumber: Badan Pusat Statistik, olahan penulis 2024. (www.bps.go.id)

Gambar 4. 6 Persentase Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Simalungun Tahun 2014 dan 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat pada tahun 2014, persentase desa tertinggal adalah 10,36%, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 5,18%, menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah desa tertinggal. Untuk desa berkembang, persentasenya meningkat dari 87,56% pada tahun 2014 menjadi 91,19% pada tahun 2018, menandakan adanya perbaikan dan perkembangan yang signifikan di banyak desa. Terakhir, desa mandiri mengalami peningkatan dari 2,07% pada tahun 2014 menjadi 3,63% pada tahun 2018, menunjukkan bahwa lebih banyak desa telah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, gambar tersebut menggambarkan tren positif dalam pembangunan desa di Kabupaten Simalungun, dengan penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa berkembang dan mandiri.



Sumber: Badan Pusat Statistik, olahan penulis 2024. (www.bps.go.id)

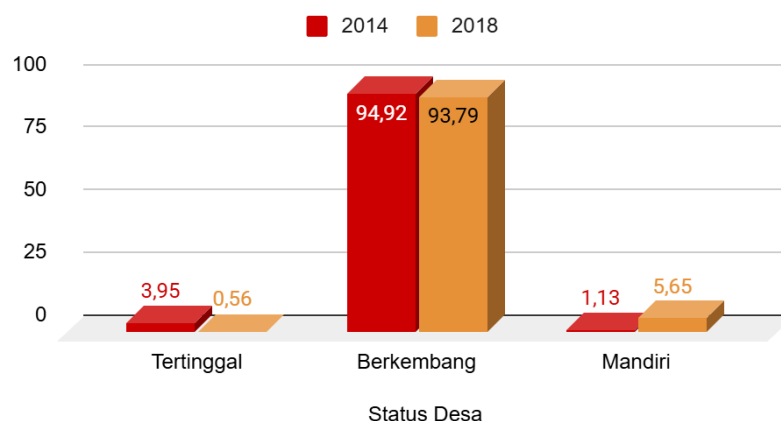
Gambar 4. 7 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Simalungun

Dari gambar diatas dapat dilihat pada dimensi Pelayanan Dasar, terjadi sedikit peningkatan dari 61,14 pada tahun 2014 menjadi 61,35 pada tahun 2018. Kondisi Infrastruktur juga menunjukkan peningkatan dari 40,67 pada tahun 2014 menjadi 51,25 pada tahun 2018. Dimensi Aksesibilitas/Transportasi mengalami peningkatan signifikan dari 80,46 pada tahun 2014 menjadi 81,05 pada tahun 2018.

Pada dimensi Pelayanan Umum, terjadi peningkatan dari 48,04 pada tahun 2014 menjadi 50,42 pada tahun 2018. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 57,65 pada tahun 2014 menjadi 69,46, pada tahun 2018, yang merupakan peningkatan terbesar di antara semua dimensi yang diukur. Secara keseluruhan, IPD menunjukkan peningkatan dari 60,38 pada tahun 2014 menjadi 62,51 pada tahun 2018. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap dimensi IPD mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2018, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada dimensi Pelayanan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintah, yang menunjukkan aspek kesehatan lingkungan

masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang semakin bagus pada desa-desa di Kabupaten Simalungun.

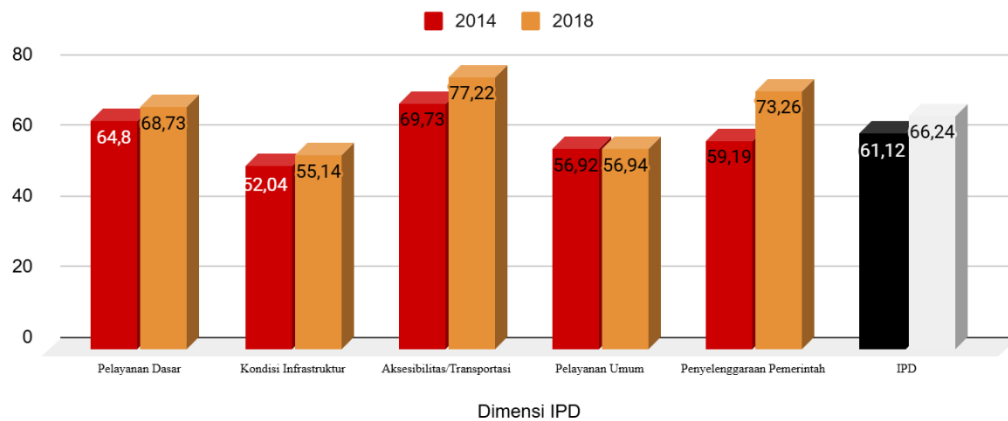
4.2.3 Perkembangan Nilai IPD Kabupaten Asahan



Sumber: Badan Pusat Statistik, olahan penulis 2024. (www.bps.go.id)

Gambar 4. 8 Persentase Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Asahan Tahun 2014 dan 2018

Kabupaten Asahan pada tahun 2014, persentase desa tertinggal menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 di tahun 2014 adalah 3,95%, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,56%. Untuk desa berkembang, persentasenya meningkat dari 94,92% pada tahun 2014 menjadi 93,79% pada tahun 2018, menandakan adanya perbaikan dan perkembangan yang signifikan di banyak desa. Terakhir, desa mandiri mengalami peningkatan dari 1,13% pada tahun 2014 menjadi 5,65% pada tahun 2018, menunjukkan bahwa lebih banyak desa telah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, gambar tersebut menggambarkan tren positif dalam pembangunan desa di Kabupaten Asahan, dengan penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa berkembang dan mandiri.



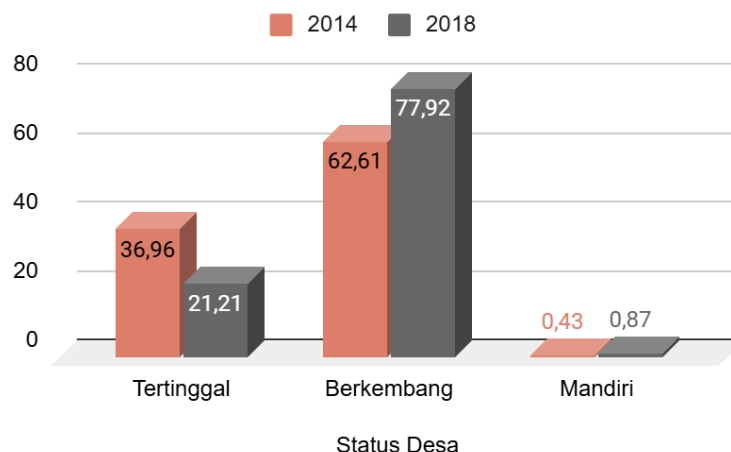
Sumber: Badan Pusat Statistik, olahan penulis 2024. (www.bps.go.id)

Gambar 4. 9 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Asahan

Gambar diatas menjelaskan dimensi Pelayanan Dasar, terjadi sedikit peningkatan dari 64,48 pada tahun 2014 menjadi 68,73 pada tahun 2018. Kondisi Infrastruktur juga menunjukkan peningkatan dari 52,04 pada tahun 2014 menjadi 55,24 pada tahun 2018. Dimensi Aksesibilitas/Transportasi mengalami peningkatan signifikan dari 69,73 pada tahun 2014 menjadi 77,22 pada tahun 2018.

Pada dimensi Pelayanan Umum, terjadi peningkatan dari 56,92 pada tahun 2014 menjadi 56,94 pada tahun 2018. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 59,29 pada tahun 2014 menjadi 73,26, pada tahun 2018, yang merupakan peningkatan terbesar di antara semua dimensi yang diukur. Secara keseluruhan, IPD menunjukkan peningkatan dari 61,12 pada tahun 2014 menjadi 66,24 pada tahun 2018. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap dimensi IPD mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2018, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada dimensi Aksesibilitas/Transportasi dan Penyelenggaraan Pemerintah, yang mencerminkan perbaikan dalam infrastruktur dan tata kelola pemerintahan di desa-desa di Kabupaten Asahan.

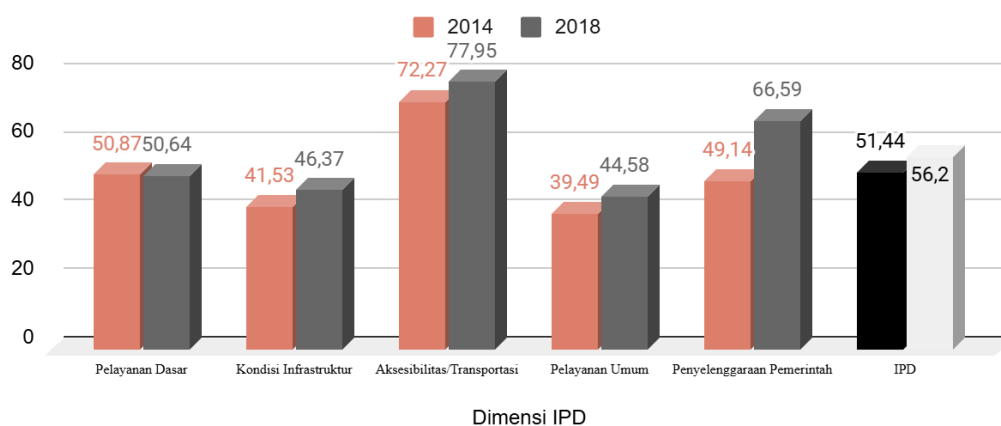
4.2.4 Perkembangan Nilai IPD Kabupaten Toba Samosir



Sumber: Badan Pusat Statistik, olahan penulis 2024. (www.bps.go.id)

Gambar 4. 10 Persentase Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014 dan 2018

Gambar tersebut menunjukkan perubahan status, pada tahun 2014, persentase desa tertinggal adalah 36,96%, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 21,21%, menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah desa tertinggal. Untuk desa berkembang, persentasenya meningkat dari 62,61% pada tahun 2014 menjadi 77,92% pada tahun 2018, menandakan adanya perbaikan dan perkembangan yang signifikan di banyak desa. Terakhir, desa mandiri mengalami peningkatan dari 0,43% pada tahun 2014 menjadi 0,87% pada tahun 2018, menunjukkan bahwa lebih banyak desa telah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, gambar tersebut menggambarkan tren positif dalam pembangunan desa di Kabupaten Toba Samosir, dengan penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri dan berkembang.



Sumber: Badan Pusat Statistik, olahan penulis 2024. (www.bps.go.id)

Gambar 4. 11 Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Toba Samosir

Gambar diatas menjelaskan dimensi menurut Indeks Pembangunan desa dimana pada dimensi Pelayanan Dasar terjadi sedikit penurunan dari 50,87 pada tahun 2014 menjadi 50,64 pada tahun 2018. Kondisi Infrastruktur menunjukkan peningkatan dari 41,53 pada tahun 2014 menjadi 46,37 pada tahun 2018. Dimensi Aksesibilitas/Transportasi mengalami peningkatan signifikan dari 72,27 pada tahun 2014 menjadi 77,95 pada tahun 2018.

Pada dimensi Pelayanan Umum, terjadi peningkatan dari 39,49 pada tahun 2014 menjadi 44,58 pada tahun 2018. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 49,14 pada tahun 2014 menjadi 66,59, pada tahun 2018, yang merupakan peningkatan terbesar di antara semua dimensi yang diukur. Secara keseluruhan, IPD menunjukkan peningkatan dari 51,44 pada tahun 2014 menjadi 56,20 pada tahun 2018. Dalam hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan dimensi IPD mengalami peningkatan, namun menurun di satu dimensi yaitu dimensi pelayanan dasar dari tahun 2014 ke 2018. Peningkatan paling signifikan terjadi pada dimensi Aksesibilitas/Transportasi dan Penyelenggaraan

Pemerintah, yang mencerminkan perbaikan dalam infrastruktur dan tata kelola pemerintahan di desa-desa di Kabupaten Toba Samosir. Dimensi pelayanan umum mengalami sedikit penurunan, dalam hal ini berarti ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan makin berkurang di desa-desa Kabupaten Toba Samosir.

Dari perkembangan IPD di 3 kabupaten tersebut kabupaten dengan jumlah desa tertinggal paling sedikit yaitu Kabupaten Asahan yaitu sebesar 0,56% di tahun 2018, sedangkan jumlah desa tertinggal terbanyak terletak di Kabupaten Tobasa yaitu 21,21% di tahun 2018. Desa dengan jumlah desa mandiri terbanyak terletak di Kabupaten Asahan sebesar 5,65% di tahun 2018, sedangkan jumlah desa mandiri terendah terletak di Kabupaten Tobasa dengan nilai sebesar 0,87%. Pada umumnya terjadi peningkatan nilai IPD, jumlah desa berdasarkan statusnya juga mengalami peningkatan, hingga dimensi IPD juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2018.

4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

1) Pemilihan Model terbaik

Tabel 4. 11 Hasil Regresi Ordinary Least Square (OLS)

Dependent Variable: IPD

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/24 Time: 10:10

Sample (adjusted): 2014 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-244.7845	90.40363	-2.707684	0.0733

PE	9.142622	2.453058	3.727031	0.0336
IPM	3.665739	1.130243	3.243319	0.0477
DD	-0.140005	0.040132	-3.488598	0.0398
PP	-1.05E-11	3.20E-12	-3.283496	0.0463
PAD	0.299041	0.050685	5.900041	0.0097
Root MSE	0.858618	R-squared	0.969039	
Mean dependent var	60.98222	Adjusted R-squared	0.917438	
S.D. dependent var	5.175719	S.E. of regression	1.487170	
Akaike info criterion	3.866348	Sum squared resid	6.635021	
Schwarz criterion	3.997831	Log likelihood	-11.39856	
Hannan-Quinn criter.	3.582608	F-statistic	18.77940	
Durbin-Watson stat	2.839200	Prob(F-statistic)	0.017984	

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Tabel 4. 12 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: IPD

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/24 Time: 10:10

Sample (adjusted): 2014 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-244.7845	90.40363	-2.707684	0.0733
PE	9.142622	2.453058	3.727031	0.0336
IPM	3.665739	1.130243	3.243319	0.0477
DD	-0.140005	0.040132	-3.488598	0.0398
PP	-1.05E-11	3.20E-12	-3.283496	0.0463
PAD	0.299041	0.050685	5.900041	0.0097

Root MSE	0.858618	R-squared	0.969039
Mean dependent var	60.98222	Adjusted R-squared	0.917438
S.D. dependent var	5.175719	S.E. of regression	1.487170
Akaike info criterion	3.866348	Sum squared resid	6.635021
Schwarz criterion	3.997831	Log likelihood	-11.39856
Hannan-Quinn criter.	3.582608	F-statistic	18.77940
Durbin-Watson stat	2.839200	Prob(F-statistic)	0.017984

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Tabel 4. 13 Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: IPD

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/24 Time: 10:10

Sample (adjusted): 2014 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-129.0564	12.87689	-10.02233	0.0633
IPM	2.864087	0.136746	20.94464	0.0304
PE	-2.165447	0.821898	-2.634692	0.2309
DD	0.049519	0.014048	3.525029	0.1760
PP	3.42E-12	1.00E-12	3.410227	0.1816
PAD	-0.164392	0.031925	-5.149324	0.1221

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.055223	R-squared	0.999872
Mean dependent var	60.98222	Adjusted R-squared	0.998975

S.D. dependent var	5.175719	S.E. of regression	0.165669
Akaike info criterion	-1.177092	Sum squared resid	0.027446
Schwarz criterion	-1.001781	Log likelihood	13.29691
Hannan-Quinn criter.	-1.555412	F-statistic	1115.304
Durbin-Watson stat	3.140306	Prob(F-statistic)	0.023052

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Tabel 4. 14 Hasil Uji Chow Pada Model FEM

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	120.372580	(2,1)	0.0643
Cross-section Chi-square	49.390957	2	0.0000

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Karena nilai probability dari Cross-section F dan Cross section Chi-square $0.0645 > 0,05$ maka H_0 diterima, dan model terbaik yang kita pilih dan digunakan dalam persamaan di pengolahan data ini adalah Common Effect Model (CEM).

Hasil Regresi Random Effect Model

Model ini tidak bisa diolah karena dalam estimasi model efek acak (Random Effects), salah satu aspek penting adalah memastikan bahwa jumlah cross-sections (unit cross-sectional) lebih besar daripada jumlah koefisien. Hal ini terutama berlaku saat menggunakan estimator antara (between estimator) untuk mengestimasi varians inovasi efek acak.

Interpretasi Model Terbaik

Tabel 4. 15 Hasil Regresi Model Terbaik

Dependent Variable: IPD

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/24 Time: 10:10

Sample (adjusted): 2014 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-244.7845	90.40363	-2.707684	0.0733
PE	9.142622	2.453058	3.727031	0.0336
IPM	3.665739	1.130243	3.243319	0.0477
DD	-0.140005	0.040132	-3.488598	0.0398
PP	-1.05E-11	3.20E-12	-3.283496	0.0463
PAD	0.299041	0.050685	5.900041	0.0097
Root MSE	0.858618	R-squared	0.969039	
Mean dependent var	60.98222	Adjusted R-squared	0.917438	
S.D. dependent var	5.175719	S.E. of regression	1.487170	
Akaike info criterion	3.866348	Sum squared resid	6.635021	
Schwarz criterion	3.997831	Log likelihood	-11.39856	
Hannan-Quinn criter.	3.582608	F-statistic	18.77940	
Durbin-Watson stat	2.839200	Prob(F-statistic)	0.017984	

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada tingkat signifikansi 1% ($\alpha < 0,01$). Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Desa (DD), Pertumbuhan Ekonomi

(PE), Pengeluaran pemerintah (PP) berpengaruh signifikan pada tingkat 5% ($\alpha < 0,05$). Hasil regresi juga menghasilkan nilai R-squared yang sangat tinggi yaitu sebesar 0.969039 artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tabel 4. 16 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

Variabel	OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	CEM (<i>Common Effect Model</i>)
PE	9.142622***	9.142622***
	(3.727031)	(3.727031)
IPM	3.665739****	3.665739****
	(3.243319)	(3.243319)
PP	-1.05E-11***	-1.05E-11***
	(-3.283496)	(-3.283496)
DD	-0.140005***	-0.140005***
	(-3.488598)	(-3.488598)
PAD	0.299041****	0.299041****
	(5.900041)	(5.900041)
Konstanta	-244.7845**	-244.7845**
	(-2.707684)	(-2.707684)
Number of Obs	9	9
Adj R-Squared	0.917438	0.917438
R (Correlation)	0.957829	0.957829
Uji F	18.77940****	18.77940****
	(0.017984)	(0.017984)
D-W (Durbin-Watson)	2.839200	2.839200

Keterangan: *Level of significant, ****1%, ***5%, **10%, *15%, (t-statistic)

Sumber: Eviews 12 dan diolah

2) Penaksiran

Tabel 4. 17 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

	IPD	PE	IPM	PP	DD	PAD
Mean	60.98222	4.975556	72.05667	1.51E+12	150.8856	110.6367
Median	61.12000	4.960000	72.49000	1.40E+12	152.1600	96.39000
Maximum	68.68000	5.880000	75.96000	2.28E+12	306.9200	210.9400
Minimum	51.44000	4.240000	67.51000	7.68E+11	49.65000	25.92000
Std. Dev.	5.175719	0.576327	2.604069	5.26E+11	80.04446	59.82322
Skewness	-0.352352	0.135145	-0.255832	0.286742	0.657986	0.253456
Kurtosis	2.577697	1.850401	2.290192	1.968980	2.720034	2.020210
Jarque-Bera	0.253105	0.522988	0.287110	0.521957	0.678810	0.456355
Probability	0.881128	0.769900	0.866273	0.770298	0.712194	0.795983
Sum	548.8400	44.78000	648.5100	1.36E+13	1357.970	995.7300
Sum Sq. Dev.	214.3046	2.657222	54.24940	2.21E+24	51256.92	28630.54
Observations	9	9	9	9	9	9

Sumber: E-Views 12, olahan penulis 2024

Data statistik diatas menunjukkan rata-rata IPD adalah 60,98 dengan sedikit asimetri ke kiri, menunjukkan distribusi yang relatif merata di seluruh daerah. Pertumbuhan Ekonomi memiliki rata-rata 4,98 dengan distribusi yang hampir simetris. Indeks Pembangunan Manusia memiliki rata-rata 72,06 dengan sedikit asimetri ke kiri, mencerminkan variasi yang rendah antar daerah. Pendapatan Perkapita rata-rata sebesar Rp1,51 triliun, menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar daerah dengan distribusi yang sedikit miring ke kanan. Dana Desa memiliki variasi yang cukup besar dengan rata-rata 150,89, dan distribusinya juga miring ke kanan. Terakhir, Pendapatan Asli Daerah rata-rata

sebesar 110,64, juga menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah dengan distribusi yang sedikit asimetris ke kanan. Analisis distribusi dengan uji Jarque-Bera menunjukkan bahwa sebagian besar variabel mendekati distribusi normal.

a. Korelasi (R)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R sebesar 0.969039, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel Indeks Pembangunan Desa (IPD) menggambarkan hubungan yang sangat erat.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

koefisien determinasi (R-squared) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menjelaskan variabel terikat Indeks Pembangunan Desa (IPD). Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai inflasi sebesar 0.917438, artinya kontribusinya sebesar 91,74%. Sedangkan sisanya 8,26% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada *disturbance error term*.

3) Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi diatas maka model ekonometrikany yaitu :

$$IPD_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PP_{it} + \beta_4 DD_{it} + \beta_5 PAD_{it} + \varepsilon_{jt}$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut:

$$\text{IPD}_{it} = -244.7845_{it} + 9.142622 \text{ PE}_{it} + 3.665739 \text{ IPM}_{it} + (-1.05\text{E-}11) \\ \text{PP}_{it} + (-0.140005) \text{ DD}_{it} + 0.299041 \text{ PAD}_{it}$$

Koefisien $\beta_0 = -244.7845$, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi (PE), indeks pembangunan manusia (IPM), pengeluaran pemerintah (PP), dana desa (DD) dan pendapatan asli daerah (PAD) kita abaikan maka diperkirakan nilai indeks pembangunan desa (IPD) berkurang sebesar 244,78, dan jika dilihat dari hasil olahan data diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0733 ($\alpha < 0,10$) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi nilai indeks pembangunan desa akan menurun sebesar 244,78 jika mengabaikan variabel bebas diatas.

Koefisien $\beta_1 = 9.142622$, artinya jika pertumbuhan ekonomi (PE) digunakan maka diperkirakan nilai indeks pembangunan desa (IPD) akan meningkat sebesar 9,14. Dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0336 ($\alpha < 0,05$). Maka dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks pembangunan desa.

Koefisien $\beta_2 = 3.665739$, artinya jika nilai indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan maka diperkirakan nilai indeks pembangunan desa (IPD) akan meningkat sebesar 3,66. Dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0477 ($\alpha < 0,05$). Maka dapat disimpulkan nilai indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks pembangunan desa.

Koefisien $\beta_3 = -1.05E-11$, artinya jika pengeluaran pemerintah (PP) digunakan maka diperkirakan nilai indeks pembangunan desa (IPD) akan menurun sebesar 0,000000000000105. Dan jika dilihat dari olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0463 ($\alpha < 0,05$). Maka dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks pembangunan desa.

Koefisien $\beta_4 = -0.140005$, artinya jika dana desa (DD) digunakan maka diperkirakan nilai indeks pembangunan desa (IPD) akan menurun sebesar 0,14. Dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0398 ($\alpha < 0,05$). Maka dapat disimpulkan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks pembangunan desa.

Koefisien $\beta_5 = 0.299041$, artinya jika pendapatan asli daerah (PAD) digunakan maka diperkirakan nilai indeks pembangunan desa (IPD) akan meningkat sebesar 0,29. Dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0097 ($\alpha < 0,05$). Maka dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks pembangunan desa.

4) Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji-t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual atau masing-masing dalam menjelaskan variabel terikat. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai tabel dengan cara mencari $df = (n-k) = 9 - 6 = 3$ dengan ($\alpha = 10\%$) maka nilai tabel sebesar ± 2.35336 .

Kriteria uji:

Terima H_0 jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$

Tabel 4. 18 Hasil Uji t

Dependent Variable: IPD

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/24 Time: 10:10

Sample (adjusted): 2014 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-244.7845	90.40363	-2.707684	0.0733
PE	9.142622	2.453058	3.727031	0.0336
IPM	3.665739	1.130243	3.243319	0.0477
DD	-0.140005	0.040132	-3.488598	0.0398
PP	-1.05E-11	3.20E-12	-3.283496	0.0463
PAD	0.299041	0.050685	5.900041	0.0097

Sumber: E-views 12 dan diolah

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

- t hitung Pertumbuhan Ekonomi (PE) berada di luar $\pm t$ tabel maka tolak H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPD. Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0336 atau pada alpha ($\alpha = 5\%$)
- t hitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di luar $\pm t$ tabel maka tolak H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara IPM terhadap IPD. Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0477 atau pada alpha ($\alpha = 5\%$)

- c. t hitung Pengeluaran Pemerintah (PP) berada di luar $\pm t$ tabel maka tolak H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap IPD. Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0463 atau pada alpha ($\alpha = 5\%$)
- d. t hitung Dana Desa (DD) berada di luar $\pm t$ tabel maka tolak H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara dana desa terhadap IPD. Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0398 atau pada alpha ($\alpha = 5\%$)
- e. t hitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di luar $\pm t$ tabel maka tolak H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap IPD. Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0097 atau pada alpha ($\alpha = 1\%$)

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji-F) bertujuan untuk pengujian signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 19 Hasil Uji F

R-squared	0.969039
Adjusted R-squared	0.917438
S.E. of regression	1.487170
Sum squared resid	6.635021
Log likelihood	-11.39856
F-statistic	18.77940
Prob(F-statistic)	0.017984

Sumber: E-views 12 dan diolah

Dari hasil regresi didapati variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.017984 dan nilai F statistic sebesar 18,7802716 .

Nilai F hitung akan dibandingkan dengan F tabel = $F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$, maka F tabel = $(10\% ; 9-6-1) = (0.1 ; 2)$ dengan demikian nilai F tabel adalah 19,40

Kriteria uji

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Kesimpulan yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti terima H_0 . Artinya ada hubungan secara serentak antara variabel pertumbuhan ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD).

5) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kemampuan variabel bebas menjelaskan perilaku variabel terikatnya. Berdasarkan pemahaman terhadap nilai R^2 maka jika suatu model memiliki nilai R^2 yang besar maka sudah seharusnya pengujian signifikansi (uji t) terhadap masing-masing variabel bebas menghasilkan nilai signifikansi yang tinggi. Namun, terkadang didapati suatu fakta bahwa nilai R^2 yang tinggi ternyata hanya menghasilkan nilai pengujian signifikansi (uji t) yang rendah, hal inilah yang disebut dengan multikolinearitas. Dalam hasil olahan diatas

dapat dilihat setiap variabel bebas memiliki nilai signifikansi (uji t) yang tinggi, Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah (PP), Dana Desa (DD) berada pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada tingkat signifikansi 1 %, dalam hal ini maka penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.452098	Prob. F(5,3)	0.2455
Obs*R-squared	7.230725	Prob. Chi-Square(5)	0.2040
Scaled explained SS	0.207262	Prob. Chi-Square(5)	0.9990

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (4) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,2040. Oleh karena p value $0,2040 > 0,05$ maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Auto Korelasi

Tabel 4. 21 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.665666	Prob. F(2,1)	0.6549
Obs*R-squared	5.139545	Prob. Chi-Square(2)	0.0766

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (2) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,766. Oleh karena p value $0,766 > 0,05$ maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi.

Selain itu, dapat dilakukan pengujian yang lain dengan melihat nilai Durbin Watson sebesar 2.839200, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi.

4.4. Hasil dan Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPD

Dari hasil olahan menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap IPD. Ketika ekonomi meningkat, pendapatan perkapita meningkat, memungkinkan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan dan pendidikan yang merupakan pondasi pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi juga membuka lebih banyak peluang kerja, baik melalui pengembangan usaha lokal maupun investasi baru, yang membantu mengurangi kemiskinan di desa. Selain itu, peningkatan layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan mendukung masyarakat desa untuk lebih berdaya dan mampu mengelola pembangunan secara mandiri.

Hal ini didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi klasik, menurut Adam Smith dan David Ricardo bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi melalui akumulasi modal, peningkatan produktivitas, dan pembagian kerja. Di tingkat desa, peningkatan produktivitas dalam sektor-sektor utama seperti pertanian dan kerajinan, serta investasi dalam infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkontribusi pada pembangunan desa.

4.4.2 Pengaruh IPM terhadap IPD

Dari hasil regrese menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara positif terhadap IPD. Keduanya merupakan indikator yang mencerminkan tingkat

kesejahteraan dan pembangunan, tetapi dari perspektif yang berbeda, IPM di tingkat individu dan daerah, sedangkan IPD di tingkat desa. IPM menggambarkan kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Desa dengan IPM yang tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil yang secara langsung meningkatkan kemampuan desa untuk berkembang. Secara keseluruhan IPM dan IPD saling mendukung, di mana peningkatan kualitas hidup individu yang tercermin dalam IPM akan memperkuat kapasitas pembangunan di tingkat desa yang diukur melalui IPD.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. IPM yang tinggi mencerminkan pembangunan berkelanjutan di tingkat individu yang kemudian berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

4.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPD

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap IPD. Hal ini didukung dengan teori *Crowding out* dalam ekonomi publik. Teori ini berpendapat peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mengurangi alokasi sumber daya yang tersedia untuk sektor swasta dan masyarakat lokal, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas pembangunan desa. Ini bisa terjadi jika proyek-proyek pemerintah mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif di tingkat desa.

4.4.4 Pengaruh Dana Desa terhadap IPD

Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh secara negatif terhadap IPD. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulitasari & Tyas (2020) yang meneliti tentang dana desa, status desa, serta keterkaitan di antara keduanya menurut IDM tahun 2018 dan 2019 Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian Yulitasari & Tyas (2020) menunjukkan bahwa perubahan besaran dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan status desa di Provinsi Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, meskipun dana desa bertujuan untuk mendorong pembangunan, berbagai faktor seperti korupsi, manajemen yang buruk, ketergantungan, dan pembangunan yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan dampak negatif pada pembangunan desa. Peningkatan transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diharapkan ditingkatkan kembali untuk mengatasi hal tersebut.

4.4.5 Pengaruh PAD terhadap IPD

Berdasarkan hasil regresi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PAD, sejalan dengan penelitian Andi & Puji (2022) tentang Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan PADes berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap IDM.

PAD sebagai sumber pendanaan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil perusahaan milik daerah. Sumber dana ini sangat penting untuk mendanai berbagai program

pembangunan, termasuk di tingkat desa. Konsep tersebut memiliki kesamaan dengan kemampuan fiskal secara otonom yang dimiliki oleh daerah yang berpenghasilan PAD yang besar (Wibowo, 2008). Namun efektivitas PAD dalam pembangunan desa sangat bergantung pada perencanaan yang baik, transparansi dalam pengelolaan dana, dan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pembangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara analisis ekonomi deskriptif, perkembangan nilai indeks pembangunan desa di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Asahan dan Tobasa mengalami peningkatan pada umumnya. Jika dilihat dari dimensi indeks pembangunan desa yaitu Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintah, dimensi yang mengalami peningkatan paling signifikan yaitu Penyelenggraan pemerintah. Artinya tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simlaungun, Asahan, dan Tobasa sudah meningkat. Dari perkembangan IPD di 3 kabupaten tersebut kabupaten dengan jumlah desa tertinggal paling sedikit yaitu Kabupaten Asahan yaitu sebesar 0,56% di tahun 2018, sedangkan jumlah desa tertinggal terbanyak terletak di Kabupaten Tobasa yaitu 21,21% di tahun 2018. Desa dengan jumlah desa mandiri terbanyak terletak di Kabupaten Asahan sebesar 5,65% di tahun 2018, sedangkan jumlah desa mandiri terendah terletak di Kabupaten Tobasa dengan nilai sebesar 0,87%.
2. Dari hasil regresi menggunakan model ekonometrika menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PE), indeks pembangunan manusia (IPM), pengeluaran pemerintah (PP), dana desa (DD), pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks

pembangunan desa (IPD) baik secara parsial dan simultan. Dari hasil regresi ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada tingkat signifikansi 1% ($\alpha < 0,01$). Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Desa (DD), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pengeluaran pemerintah (PP) berpengaruh signifikan pada tingkat 5% ($\alpha < 0,05$).

5.2 Saran

1. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah merupakan dimensi yang mengalami peningkatan paling signifikan, oleh karena itu pemerintah daerah perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ini bisa dilakukan dengan mengimplementasikan pelatihan rutin bagi aparat desa dan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
2. Penggunaan dana desa harus dioptimalkan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan IPD, seperti program kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Transparansi dalam penggunaan dana desa juga perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Kabupaten dengan desa tertinggal tertinggi seperti Tobasa, perlu fokus pada pengembangan ekonomi lokal melalui program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, dan peningkatan akses pasar bagi produk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Djihad Hisyam. (2004). *Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan. IV*, 23–32.
- Dwi Agus Prastiwi. (2019). *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Dwi Nisa'ul Husna. (2020). *Analisis Indikator Indeks Pembangunan Desa*.
- Hafni, R. (2024). *Statistika Ekonomi*. Perdana Publishing.
- Hidayati, R. A. (2021). *Analisis Potensi Desa Berbasis Indeks Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Kabupaten Gresik. Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 25.
<https://doi.org/10.30587/jre.v4i1.2161>
- Hindun Barokah. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Badan Pusat Statistik.
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simalungun 2023*. (n.d.).
- Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara 2023*. (n.d.).
- M. L. Jhingan. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerbit Rajawali Press.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi* (6th ed.). Penerbit Erlangga.
- Michael P. Todaro, & Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Penerbit Erlangga.
- Mudrajat Kuncoro. (2000). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (3rd ed.). Penerbit UPP AMP YKPN.
- Mudrajat Kuncoro. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (3rd ed.). Penerbit Erlangga.
- Oki Oktaviana, & Bani Adi Darma. (2022). Analisis Pembangunan Desa Di Provinsi Banten Berdasarkan Perbandingan Capaian Nilai IDM. *Jurnal Administrasi Publik*, 13, 188–205.
- Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020*. (2020). Dirjen Perimbangan Keuangan. www.djpk.kemenkeu.go.id

- Prio Haryanto, T., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2013a). *EDAJ 2 (3) (2013) Economics Development Analysis Journal* Dipublikasikan Agustus 2013. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Prio Haryanto, T., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2013b). *EDAJ 2 (3) (2013) Economics Development Analysis Journal* Dipublikasikan Agustus 2013. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Sosial, J. I., Humaniora, D., Pembangunan, E., Berdasarkan, D., Nyoman Astika, A., & Subawa, N. S. (2021). *Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. Nyoman Sri Subawa*, 5. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Wahyudi, S. T. (2020). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-VIEWS* (Monalisa, Ed.; 2nd ed.). Rajawali Pers.
- Widiansyah, A., Bhayangkara, U., Raya, J., Perjuangan, J. R., Utara, B., & Barat, J. (2017). *Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. XVII(2)*.
- Rahayu, S. E. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Perdana Publishing

LAMPIRAN

A. Data mentah sebelum diregresi (diolah)

Kabupaten	Tahun	IPD	PE (%)	IPM	PP (Rupiah)	DD (Miliar Rupiah)	PAD (Miliar Rupiah)
Simalungun	2,014	60.38	5.33	70.89	1,648,278,603,000	102.70	96.4
Simalungun	2,018	62.51	5.18	72.49	2,269,698,962,407	230.40	164.1
Simalungun	2,022	63.45	4.68	73.77	2,276,772,829,461	306.92	210.9
Asahan	2,014	61.12	5.88	67.51	1,388,135,949,419	49.65	91.5
Asahan	2,018	66.24	5.61	69.49	1,396,390,237,081	126.61	121.7
Asahan	2,022	68.68	4.66	71.13	1,711,070,534,367	152.16	162.7
Tobasa	2,014	51.44	4.24	72.79	767,551,670,816	66.62	25.9
Tobasa	2,018	56.20	4.96	74.48	1,065,656,140,942	154.31	50.2
Tobasa	2,022	58.82	4.24	75.96	1,050,130,916,931	168.60	72.3

B. Statistika deskriptif

	IPD	PE	IPM	PP	DD	PAD
Mean	60.98222	4.975556	72.05667	1.51E+12	150.8856	110.6367
Median	61.12000	4.960000	72.49000	1.40E+12	152.1600	96.39000
Maximum	68.68000	5.880000	75.96000	2.28E+12	306.9200	210.9400
Minimum	51.44000	4.240000	67.51000	7.68E+11	49.65000	25.92000
Std. Dev.	5.175719	0.576327	2.604069	5.26E+11	80.04446	59.82322
Skewness	-0.352352	0.135145	-0.255832	0.286742	0.657986	0.253456
Kurtosis	2.577697	1.850401	2.290192	1.968980	2.720034	2.020210
Jarque-Bera	0.253105	0.522988	0.287110	0.521957	0.678810	0.456355
Probability	0.881128	0.769900	0.866273	0.770298	0.712194	0.795983
Sum	548.8400	44.78000	648.5100	1.36E+13	1357.970	995.7300
Sum Sq. Dev.	214.3046	2.657222	54.24940	2.21E+24	51256.92	28630.54
Observations	9	9	9	9	9	9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	: Voni Yanti
NPM	: 2005180014
Tempat dan Tanggal Lahir	: Cirebon, 22 Juli 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Pinang Baris No.62

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Saut Situmorang
Nama Ibu	: Lasma Simbolon
Alamat	: Desa Naga Kisar

C. DATA PENDIDIKAN NORMAL

1. Tahun 2007 - 2013	: SD Al-Washliyah
2. Tahun 2013 - 2016	: SMP Panca Budi Medan
3. Tahun 2016 - 2019	: SMK Negeri 8 Medan
4. Tahun 2020 – 2024, tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menerima surat ini agar diutamakan
pemer dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1658 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Eko. Pembangunan
Pada Tanggal : 07 Oktober 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Voni Yanti
N P M : 2005180014
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Eko. Pembangunan
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) Di Tiga Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Dosen Pembimbing : Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **24 Juni 2025**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Dzulhijjah 1445 H
24 Juni 2024



Dekan
Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : VONI YANTI
NPM : 2005180014
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS
Judul Penelitian : ANALISIS PERKEMBANGAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) DI TIGA KABUPATEN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
06/02/2024	Bab I : memperbaiki latar belakang, menambah data dan jobarkan, tentukan identifikasi masalah		
12/02/2024	Bab I : memperbaiki rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian		
26/02/2024	Bab II : memperbaiki teori yang digunakan, gunakan buku dan referensi yang sesuai		
08/03/2024	Bab II : perbaiki penelitian terdahulu yang sesuai, perbaiki kerangka analisis dan hipotesis penelitian		
22/04/2024	Bab III : memperbaiki definisi operasional dan model estimasi ekonometrika		
30/04/2024	Bab III : perbaiki tahapan analisis		
07/05/2024	Ace u/ di Sajikan Simpuro		

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Medan, Mei 2024
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Jumat, 07 Juni 2024 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Voni Yanti
N.P.M. : 2005180014
Tempat / Tgl.Lahir : Cirebon, 22 Juli 2002
Alamat Rumah : Jl. Pinang Baris No.62
JudulProposal : Analisis Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) Di Tiga Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Analisis Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) Di Tiga Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
Bab I	Menambahkan data di Latar Belakang
Bab II	Memperbaiki kerangka analisis Penelitian
Bab III	Perbaiki model estimasi
Lainnya	
Kesimpulan	☒ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, Jumat, 07 Juni 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 07 Juni 2024** menerangkan bahwa:

Nama : Voni Yanti
N .P.M. : 2005180014
Tempat / Tgl.Lahir : Cirebon, 22 Juli 2002
Alamat Rumah : Jl. Pinang Baris No.62
JudulProposal : Analisis Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) Di Tiga Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : **Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si**

Medan, Jumat, 07 Juni 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si

Pembanding

Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

Assoc.Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 3977/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/30/4/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 30/4/2024

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Voni Yanti
NPM : 2005180014
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : riset ekonomi dan bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia terus meningkat setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal namun masih terjadi ketimpangan ekonomi
2. Pada masa pemerintahan Jokowi telah diberlakukannya kebijakan dana desa namun tidak terjadi secara merata ke seluruh desa di Indonesia

Rencana Judul : 1. Peranan Dana Desa Dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun (Idm) Di Kabupaten Simalungun
2. Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (Idm) Di Kabupaten Simalungun
3. Analisis Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Desa Di Kabupaten Simalungun

Objek/Lokasi Penelitian : Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan Dan Kabupaten Tobasa

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Voni Yanti)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 3977/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/30/4/2024

Nama Mahasiswa : Voni Yanti
NPM : 2005180014
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : riset ekonomi dan bisnis
Tanggal Pengajuan Judul : 30/4/2024
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si

Judul Disetujui**

Analisis perkembangan capaian indeks
pembangunan Desa (IPD) di Tiga
Kabupaten Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Medan, ...

Dosen Pembimbing

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

(Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M

Keterangan:

*) Ditai oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditai oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"